

DISERTASI

**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN PERDESAAN
DI INDONESIA PERIODE 2015 – 2022**

***AN ANALYSIS OF RURAL POVERTY DETERMINANTS
IN INDONESIA FROM 2015 TO 2022***

**NUR IMAM SAIFULOH
A013201009**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

DISERTASI

**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN PERDESAAN
DI INDONESIA PERIODE 2015 – 2022**

***AN ANALYSIS OF RURAL POVERTY DETERMINANTS
IN INDONESIA FROM 2015 TO 2022***

**Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor
Program Studi Ilmu Ekonomi**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NUR IMAM SAIFULOH
A013201009**



Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN PERDESAAN DI INDONESIA PERIODE 2015 – 2022

disusun dan diajukan oleh

NUR IMAM SAIFULOH
A013201009

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal 21 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

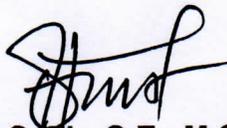
Menyetujui,

Promotor,



Prof. Dr. Nursini, S.E., MA
NIP 196607171991032001

Ko-Promotor,



Dr. Sabir, S.E., M.Si
NIP 197407152002121003

Ketua Program Studi,



Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si
NIP 196012311988111002

Ko-Promotor,



Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., MA
NIP 196305161990031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Imam Saifuloh
NIM : A013201009
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul

Analisis Determinan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia Periode 2015 - 2022

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 09 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Imam Saifuloh

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

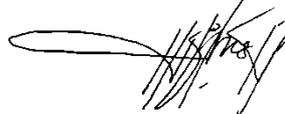
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA; Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si; dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA sebagai tim promotor atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada tim penguji internal Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si; Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS; Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si; dan Bapak Dr. Sultan Suhab, SE., MS serta penguji eksternal Ibu Istiqomah, SE., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan komentar dan masukan berharga dalam disertasi ini. Hal yang senada peneliti sampaikan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Madris, SE., DPS, M.Si beserta seluruh civitas akademika yang ada di dalamnya semoga mendapat keberkahan dan balasan setimpal dari Allah Swt.

Ucapan terima kasih kepada orang tua, isteri, dan keluarga atas doa dan dukungan yang diberikan selama peneliti menempuh studi. Terakhir, kepada teman seperjuangan khususnya angkatan 2020 kelas Ilmu Ekonomi. Semoga semua pihak mendapatkan kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga disertasi ini terselesaikan dengan baik.

Disertasi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam disertasi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan disertasi ini.

Makassar, 09 Agustus 2023



Nur Imam Saifuloh

ABSTRAK

NUR IMAM SAIFULOH. *Analisis Determinan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia Periode 2015 – 2022* (dibimbing oleh Nursini, Sabir, dan Anas Iswanto Anwar).

Penelitian ini bertujuan: mengukur dan menganalisis pengaruh migrasi neto; alih fungsi lahan pertanian; dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan perdesaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan. Data yang digunakan bersifat kuantitatif yang terdiri atas data *cross section* sebanyak 33 provinsi dan *time series* (2015 - 2022). Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis menggunakan model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi neto berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan perdesaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan. Sebaliknya, alih fungsi lahan pertanian berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan perdesaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan. Adapun dana desa berpengaruh positif secara langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan dan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan. Pertumbuhan sektor pertanian sebagai variabel intervening tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan perdesaan dan peningkatan pengangguran di perdesaan dapat menyebabkan tingkat kemiskinan perdesaan semakin tinggi.

Kata kunci: migrasi neto, alih fungsi lahan pertanian, dana desa, pertumbuhan sektor pertanian, kemiskinan perdesaan



ABSTRACT

NUR IMAM SAIFULOH. *An Analysis of Rural Poverty Determinants in Indonesia from 2015 to 2022* (supervised by Nursini, Sabir, and Anas Iswanto Anwar)

This study aims to measure and analyze the direct or indirect effect of net migration, conversion of agricultural land, and village funds to rural poverty rates through the growth of agriculture and rural unemployment. The data from 33 provinces and a time series from 2015 to 2022 comprise the quantitative data. Structural modeling was used for data analysis once the data had been gathered through documentation. The study results show that net migration negatively affects the rural poverty rate either directly or indirectly through the growth of agriculture and the rural unemployment rate. Conversely, the conversion of agricultural land positively affects rural poverty rates, either directly or indirectly, through the growth of agriculture and the rural unemployment rate. Meanwhile, village funds have a direct positive effect on the rural poverty rate and an indirect negative effect on the rural poverty rate through the growth of agriculture and the rural unemployment rate. Agricultural growth as an intervening factor has little impact on the poverty rate in the rural areas. In contrast, unemployment rates, another intervening factor in these areas, causes poverty rates to increase.

Keywords: net migration, conversion of agricultural land, village funds, agricultural growth, rural unemployment rate, and rural poverty rate



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Kegunaan Penelitian	16
1.4.1. Kegunaan Teoritis	16
1.4.2. Kegunaan Praktis	17
1.4.3. Kegunaan Kebijakan	17
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Tinjauan Teoritis	19
2.1.1. Konsep Kemiskinan	19
2.1.2. Teori Penyebab Kemiskinan	21
2.1.3. Ukuran Kemiskinan	26
2.1.4. Program Pengentasan Kemiskinan	35
2.1.5. Model Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang....	37
2.1.6. Teori Ketenagakerjaan	39
2.1.7. Teori Penggunaan Lahan	49
2.1.8. Instrumen Kebijakan Publik (Fiskal)	53
2.2. Tinjauan Empiris	56
2.2.1. Migrasi Neto dan Kemiskinan Perdesaan	56
2.2.2. Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan	58
2.2.3. Dana Desa dan Kemiskinan Perdesaan	60
2.2.4. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan	62
2.2.5. Pengangguran dan Kemiskinan Perdesaan	64

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	66
3.1. Kerangka Konseptual.....	66
3.2. Hipotesis	69
 BAB IV METODE PENELITIAN	 70
4.1. Rancangan Penelitian	70
4.2. Lokasi Penelitian	70
4.3. Jenis dan Sumber Data	71
4.4. Metode Pengumpulan Data	71
4.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	72
4.6. Teknik Analisis Data	76
 BAB V HASIL PENELITIAN	 86
5.1. Deskripsi Data	86
5.1.1. Desa dan Kemiskinan Perdesaan	86
5.1.2. Pengangguran di Perdesaan	92
5.1.3. Pertumbuhan Sektor Pertanian	94
5.1.4. Migrasi	96
5.1.5. Alih Fungsi Lahan Pertanian	103
5.1.6. Dana Desa	107
5.2. Deskripsi Hasil Statistik	110
5.2.1. Pengaruh Langsung	110
5.2.2. Pengaruh Tidak Langsung	116
 BAB VI PEMBAHASAN	 122
6.1. Analisis Pengaruh Migrasi Neto, Alih Fungsi Lahan Pertanian, dan Dana Desa terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian	123
6.1.1. Pengaruh Migrasi Neto Penduduk terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian	123
6.1.2. Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian	128
6.1.3. Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian	130
6.2. Analisis Pengaruh Migrasi Neto, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Dana Desa, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan	134
6.2.1. Pengaruh Migrasi Neto terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan	134
6.2.2. Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan	137
6.2.3. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan	139

6.2.4.	Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan	142
6.3.	Analisis Pengaruh Migrasi Neto, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Dana Desa, Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan	144
6.3.1.	Pengaruh Migrasi Neto terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan	145
6.3.2.	Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan	152
6.3.3.	Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan	156
6.3.4.	Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan	160
6.3.5.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan terhadap Tingkat Kemiskinan Perdesaan	164
BAB VII PENUTUP		167
7.1.	Kesimpulan	167
7.2.	Implikasi	169
7.3.	Keterbatasan Penelitian	172
7.4.	Saran	174
DAFTAR PUSTAKA		176
LAMPIRAN		190

DAFTAR TABEL

Tabel		Hlm.
1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Ribuan Jiwa)	3
1.2	Penduduk Pindah Masuk/Keluar Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2022	10
2.1	HPI untuk Negara Berkembang dan Negara OECD	28
2.2	<i>Multidimensional Poverty Index</i> (MPI)	29
2.3	Penentuan Kesejahteraan Keluarga Menurut BKKBN	32
4.1	Variabel, Jenis Data, dan Sumber Data	72
5.1	Kriteria Desa/Kelurahan Perdesaan dan/atau Perkotaan	88
5.2	Garis Kemiskinan Perdesaan, Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan, dan Persentase Penduduk Miskin Perdesaan Semester 2 (September), 2015 – 2022	99
5.3	Perbandingan Migrasi Neto Positif dan Migrasi Neto Negatif Lima Provinsi di Indonesia, 2015 dan 2022	98
5.4	Profil Migran Risen di Indonesia	101
5.5	Perubahan Luas Lahan Sektor Pertanian di Indonesia (hektar)	104
5.6	Nilai Dana Desa dan Jumlah Desa Penerima	107
5.7	Output Dana Desa	108
5.8	Dampak Dana Desa terhadap Kemandirian Desa 2015 – 2017	108
5.9	Nilai <i>R-Square</i> dan Uji F Model Pertumbuhan Sektor Pertanian (Y_1), Tingkat Pengangguran Terbuka (Y_2), dan Tingkat Kemiskinan Perdesaan (Y_3)	111
5.10	Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Langsung Antar Variabel	112
5.11	Pengaruh Tidak Langsung	117
5.12	Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hlm.
1.1	Tingkat Kemiskinan Nasional, Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Periode September 2015 hingga September 2022	3
1.2	Perbandingan Upah di Sektor Kapitalis Modern dan Upah di Sektor Subsisten Tradisional	7
2.1	Model Kausalitas Teori Perilaku, Teori Struktural dan Teori Politik dalam Mempengaruhi Kemiskinan	23
2.2	Perluasan Berkelanjutan (<i>Sustainable Expantion</i>) Konsep Kemiskinan Sejak 1970	26
2.3	Ilustrasi Ukuran Kemiskinan P1 dan P2	34
2.4	Diagram Ketenagakerjaan	47
2.5	Jenis Mobilitas Penduduk	48
3.1	Kerangka Konseptual	68
4.1	Model Struktural Penelitian	77
5.1	Klasifikasi Pemerintahan Terendah di Indonesia	87
5.2	Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan di Indonesia Menurut Wilayah	90
5.3	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Perdesaan di Indonesia Tahun 2015 – 2022	93
5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perdesaan di Indonesia Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	94
5.5	Jumlah Petani di Indonesia Menurut Kelompok Usia Tahun 2022	95
5.6	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Distribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	95
5.7	Perkembangan Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar di Indonesia Tahun 2015 – 2022	97
5.8	Profil Pekerja Migran Risen Menurut Lapangan Kerja Utama	102
5.9	Luas Lahan Sektor Pertanian di Indonesia 2015 – 2022 (hektar)	103
5.10	Perkembangan Luas Lahan Sawah dan Hortikultura di Indonesia Tahun 2015 – 2022 (hektar)	105
5.11	Luas Lahan Perkebunan di Indonesia Tahun 2015 – 2022 (hektar)	105
5.12	Penggunaan Dana Desa	109
5.13	Hasil Estimasi Penelitian	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hlm.
1	Data Disertasi	190
2	Olah Data Disertasi	200
3	Biodata	206

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL

Singkatan/Symbol	Keterangan
AEG	<i>Agricultural Economic Growth</i>
ALC	<i>Agricultural Land Conversion</i>
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non Makanan
GNP	<i>Gross National Product</i>
HDI	<i>Human Development Index</i>
HPI	<i>Human Poverty Index</i>
i	Individual (entitas ke-i)
IHK	Indeks Harga Konsumen
Ln	Logaritma natural
Mi	Migrasi masuk (<i>in-migration</i>)
Mn	Migrasi neto (<i>net-migration</i>)
Mo	Migrasi keluar (<i>out-migration</i>)
MPI	<i>Multidimensional Poverty Index</i>
OECD	<i>The Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OPHI	<i>Oxford Poverty and Human development Initiative</i>
P	Penduduk
P ₀ -HCI	<i>Head Count Index-P₀</i>
P ₁ -PGI	<i>Poverty Gap Index-P₁</i>
P ₂ -PSI	<i>Poverty Severity Index-P₂</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
RPR	<i>Rural Poverty Rate</i>
RUR	<i>Rural Unemployment Rate</i>
SM	<i>Structural Modeling</i>
t	<i>Time</i>
UNDP	<i>United Nation Development Program</i>
VF	<i>Village Funds</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang muncul bersamaan dengan dilaksanakannya pembangunan. Permasalahan ini dihadapi oleh seluruh negara di dunia dan utamanya bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Meskipun masalah ini telah mendapatkan perhatian sejak lama dari para ahli ekonomi maupun sosial dan bahkan berbagai bentuk kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah juga telah digulirkan, upaya tersebut tidak serta merta mengurangi kemiskinan baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun persentasenya.

Angka kemiskinan di Indonesia salah satunya dapat diketahui dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menyatakan seseorang miskin atau tidak miskin, BPS menggunakan besaran rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan yang ditetapkan dalam garis kemiskinan. Kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kalori perhari, sementara kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa lainnya. Jika garis kemiskinan yang ditetapkan semakin tinggi, maka penduduk miskin semakin banyak.

Pada kenyataannya, garis kemiskinan memiliki variasi di setiap wilayah baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Biaya kebutuhan hidup di Jawa misalnya lebih murah jika dibandingkan dengan di Papua. Di samping itu, juga

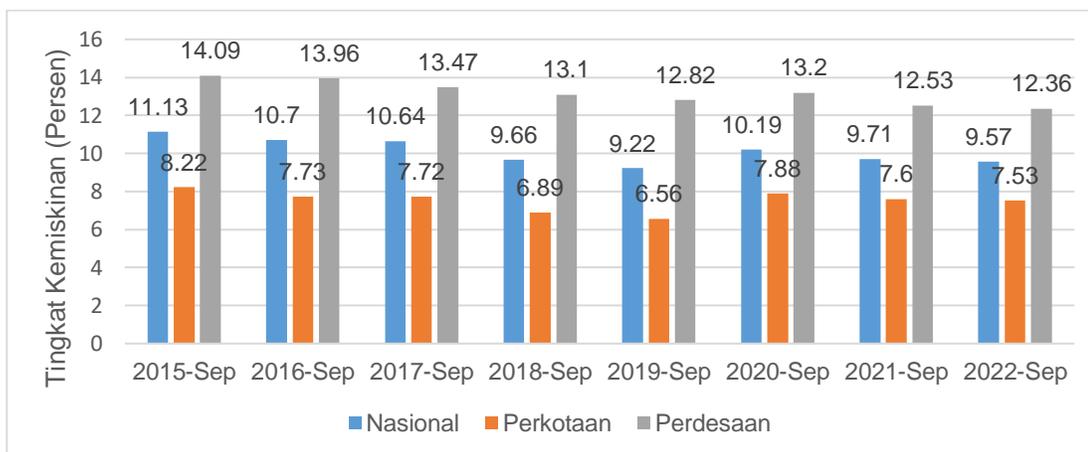
terdapat perbedaan biaya kebutuhan hidup antara perkotaan dan perdesaan meskipun dalam satu wilayah kabupaten/kota dan provinsi yang sama. Hal ini salah satunya tampak dari paket kebutuhan dasar bukan makanan perkotaan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi, sedangkan di perdesaan hanya 47 jenis komoditi.

Pada September 2022, Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp486.168 per kapita per bulan yang terdiri atas garis kemiskinan makanan sebesar Rp360.007 (74,05 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp126.161 (25,95 persen). Jika dilihat dari aspek wilayahnya, garis kemiskinan perkotaan ditetapkan sebesar Rp522.349 lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan perdesaan pada periode yang sama yakni Rp513.170. Adapun jumlah penduduk miskin dari kalkulasi tersebut mencapai 26,36 juta penduduk. Dari jumlah itu, sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di wilayah perdesaan yakni 14,38 juta penduduk atau 54,55 persen dan sisanya menempati wilayah perkotaan.

Perbedaan kemiskinan di kedua wilayah tersebut menarik untuk diulas lebih jauh. Pasalnya, jika dilihat dari tiga indikator ukuran kemiskinan yang terdiri atas persentase penduduk miskin (*Head Count Index-P₀*), Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*), insiden kemiskinan perdesaan lebih mengkhawatirkan dan mendesak untuk segera ditangani.

Berdasarkan nilai *Head Count Index*, persentase tingkat kemiskinan di perdesaan selama tujuh tahun terakhir selalu menunjukkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan perkotaan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1.1 : Tingkat Kemiskinan Nasional, Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Periode September 2015 hingga September 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 – 2022.

Tingkat kemiskinan nasional sejatinya merupakan insidensi antara tingkat kemiskinan perkotaan dan tingkat kemiskinan perdesaan. Selama delapan tahun terakhir, tingkat kemiskinan perkotaan selalu berada di bawah 9 persen bahkan rata-ratanya hanya 7,46 persen. Sementara tingkat kemiskinan perdesaan selalu di atas 12 persen dengan nilai rata-rata 13,16 persen. Perkembangan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Ribuan Jiwa)

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
2015	10.619,86	17.893,71	28.513,57
2016	10.485,64	17.278,68	27.764,32
2017	10.272,55	16.310,44	26.582,99
2018	10.131,28	15.543,31	25.674,58
2019	9.857,75	14.928,12	24.785,87
2020	12.038,50	15.511,19	27.549,69
2021	11.859,34	14.644,30	26.503,65
2022	11.980,32	14.382,95	26.363,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 – 2022.

Anggapan di atas juga diperkuat dari ukuran kemiskinan lainnya. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada 2021, nilai P_1 perdesaan sebesar 2,25 persen sementara di perkotaan hanya 1,23 persen. Adapun nilai P_2 perdesaan pada periode yang sama adalah sebesar 0,59 persen sedangkan nilai P_2 perkotaan hanya 0,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin perdesaan lebih menjauh dari garis kemiskinan yang ditetapkan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin lebar.

Keadaan kemiskinan perdesaan yang semakin mengkhawatirkan mendesak untuk dikaji dan ditemukan solusi penanganan yang tepat. Untuk membedah masalah tersebut perlu dipahami bagaimana corak kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Menurut Lewis (1959) ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia yaitu sektor subsisten yang terbelakang/tradisional dan sektor kapitalis modern. Sektor subsisten diwakili oleh sektor pertanian dan sektor informal yang memiliki kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah relatif lebih murah dari pada sektor kapitalis modern. Selama berlangsungnya industrialisasi modern di perkotaan, kelebihan penawaran tenaga kerja di sektor subsisten akan terus diserap. Sebab, murah nya biaya upah tenaga kerja asal perdesaan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk mengembangkan bisnisnya.

Berdasarkan data tipografi wilayah, perdesaan di Indonesia sebagian besar berada di daratan (52,89 persen) dan lereng (45,77 persen). Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka terdapat pula perdesaan yang berbatasan langsung dengan laut (14,88 persen). Mayoritas penduduk perdesaan bekerja di

sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan (86,48 persen). Sisanya berasal dari sektor industri dan jasa informal dengan komposisi masing-masing 4,33 persen dan 9,19 persen (Badan Pusat Statistik, 2022).

Data di atas mendukung anggapan Lewis bahwa perekonomian subsisten di perdesaan didominasi oleh sektor pertanian. Namun, masalah yang terjadi di lapangan berbeda dengan pandangan umum Lewis yang menyatakan kelebihan penawaran tenaga kerja dianggap tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi, sebab hal tersebut merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan. Asumsi yang mendasarinya adalah perpindahan tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak. Padahal, yang terjadi dewasa ini adalah sebaliknya.

Majunya perkembangan industri dan jasa di perkotaan menarik minat penduduk dari berbagai generasi untuk bekerja di sana. Tidak hanya penduduk yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan tinggi yang siap untuk bekerja di sektor formal, tetapi juga penduduk yang siap untuk bekerja di sektor informal yang terkadang tidak mensyaratkan kualifikasi tingkat pendidikan tertentu. Mulyadi (2003) menyebut bahwa sektor informal di Indonesia menjadi penting keberadaannya terutama pasca ekonomi Indonesia dirundung krisis. Jika sebelumnya sektor informal dianggap sebagai penyangga dari transformasi struktur ketenagakerjaan yang tidak seimbang, saat ini sektor informal bukan hanya sebagai tempat penampungan tetapi juga menjadi alternatif yang komplementer terhadap sektor formal. Meskipun demikian, luapan tenaga kerja di sektor informal masih bersifat subsisten dan minim proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah.

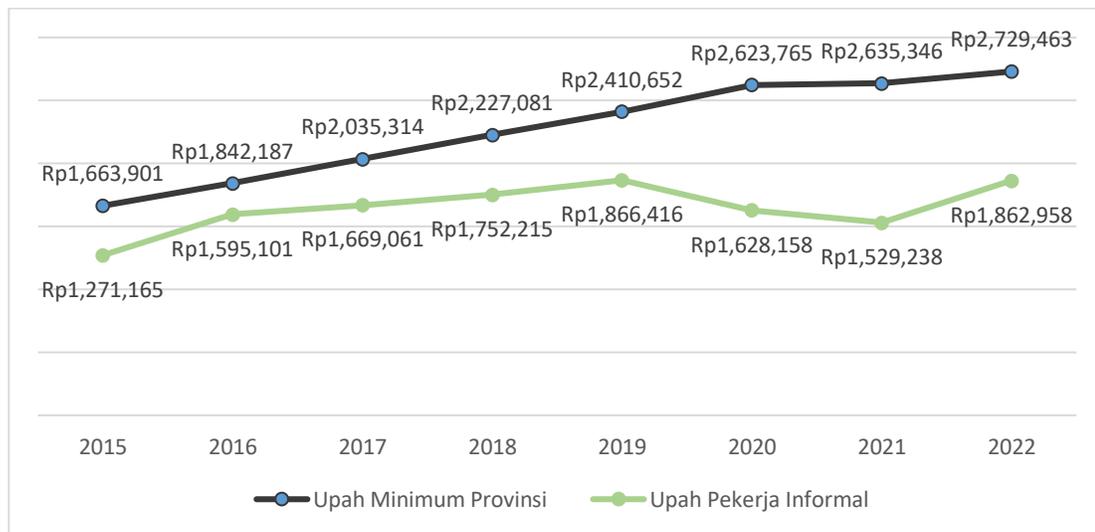
Fakta di lapangan menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian mengalami *trend* penurunan dalam dua dekade terakhir. Sektor pertanian semestinya mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa tetapi keberadaannya minim perhatian pemerintah. Upah pekerja di sektor ini juga meningkat lebih lambat dari pada sektor industri/jasa di perkotaan bahkan perkembangannya fluktuatif (lihat Gambar 1.2). Hal ini bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan Lewis di mana upah sektor pertanian seharusnya terus meningkat dan mampu mengurangi kesenjangan upah pada saat terjadi perpindahan penduduk ke sektor kapitalis modern.

Menurut hasil penelitian Foster dan Rosenzweig (2004) pertumbuhan sektor pertanian merupakan kunci mengatasi kemiskinan perdesaan. Sebab, kegiatan utama perekonomian perdesaan adalah sektor pertanian. Sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat desa. Hasil penelitian ini didukung oleh Suryahadi et al., (2009) dan Zaman dan Khilji (2013). Mereka sepakat bahwa pertumbuhan sektoral termasuk di dalamnya sektor pertanian dapat mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan.

Dari sisi ketenagakerjaan, pengangguran semu (pekerja yang ada tidak menambah *output* pertanian) tampak dalam sektor subsiten. Wilayah perdesaan di Indonesia memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perdesaan sebesar 3,43 persen per Agustus 2022. Menurut Fei-Ranis (1961), penganggur yang ada di sektor pertanian harus dialihkan ke sektor industri dengan tingkat upah institusional yang sama agar kemudian pekerja di sektor pertanian akan menghasilkan *output* yang lebih tinggi dari pada perolehan upah institusional yang mereka terima. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi akan timbul dari tahapan-tahapan tersebut.

Sektor pertanian dewasa ini juga menghadapi masalah penyempitan lahan karena banyak yang beralih fungsi (Isa, 2006) terutama untuk ekspansi industri dan jasa serta perumahan (Dewi dan Sarjana, 2015). Pemerintah juga mengambil lahan masyarakat untuk proyek-proyek strategis seperti jalan tol, bandara, hingga penambangan dan penggalian mineral dan batu bara (Sarianto et al., 2016).

Gambar 1.2 : Perbandingan Upah di Sektor Kapitalis Modern dan Upah di Sektor Subsisten Tradisional



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 – 2022.

Laporan Badan Pusat Statistik (2022) menyebut bahwa luas lahan baku sawah nasional mengalami penyusutan sedikitnya 141.952 hektar. Kasus yang sama juga terjadi pada area tanaman perkebunan rakyat yang menyusut sebanyak 168,6 ribu hektar. Tidak ketinggalan, kawasan hutan dan konservasi perairan juga berkurang seluas 105.446,7 hektar. Padahal, lahan merupakan sumber daya prinsipal bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari alam dan bekerja sebagai petani, peladang, atau pekebun.

Untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya, banyak penduduk perdesaan yang memutuskan bermigrasi baik ke perkotaan, desa lain, maupun luar negeri. Fenomena pengkotaan lazim dikenal dengan istilah urbanisasi (Arouri et al., 2017). Penduduk yang bermigrasi ke desa di provinsi lain umumnya tergabung dalam program transmigrasi. Umumnya mereka berasal dari masyarakat Jawa (Firmansyah et al., 2018). Alternatif lainnya ialah menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri (Prihanto, 2013).

Rendahnya upah kerja di sektor pertanian juga membuat banyak penduduk perdesaan beralih pekerjaan ke sektor industri dan jasa. Hal ini malah dapat meningkatkan angka pengangguran sebab banyak penduduk perdesaan tidak memiliki keahlian di kedua bidang industri/jasa terutama bagi mereka yang sebelumnya sudah bekerja di bidang pertanian (Nguyen et al., 2016). Akhirnya, banyak generasi muda perdesaan yang mengambil kesempatan tersebut sehingga pekerjaan di bidang pertanian semakin tidak diminati. Kondisi ini menyebabkan ketenagakerjaan di sektor pertanian memasuki fase kritis (Arvianti et al., 2019).

Untuk mengatasi permasalahan di atas, berbagai kajian telah dilakukan. Carré dan Drouot (2004) menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi. Munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dapat mengurangi pengangguran. Namun, pada saat yang sama beberapa pekerjaan juga hilang akibat tergantikan oleh teknologi. Temuan lainnya menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan investasi publik mampu mengurangi pengangguran (Özel et al., 2013 dan Madito dan Khumalo, 2014).

Hasil penelitian di atas diperkuat oleh anggapan Tegep et al. (2019) yang meneliti pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memediasi hubungan antara *Foreign Direct Investment (FDI)* dan tingkat pengangguran di Indonesia. Sementara temuan yang kontradiktif dinyatakan oleh Quy (2016) yang meneliti hubungan pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Vietnam. Ia menyatakan bahwa investasi publik mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi global (Saputra, 2021). Namun, pada kenyataannya tingkat kemiskinan perdesaan masih tinggi. Minimnya kesempatan kerja di perdesaan dan terbukanya peluang untuk bekerja di perkotaan dengan berbagai jenis pekerjaan apapun menjadi alasan penduduk desa melakukan migrasi (Arouri et al., 2017). Aktivitas tersebut nyatanya menimbulkan kesenjangan upah (C. I. Lee, 2008), namun di sisi lain mampu menurunkan pengangguran (Mihnenoka dan Senfelde, 2017).

Kaitannya dengan kemiskinan, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa aktivitas migrasi hanya mengalihkan kemiskinan perdesaan ke kemiskinan perkotaan (Ravallion et al., 2007). Namun, beberapa peneliti membantah kesimpulan tersebut (Adam dan Page, 2005; Acosta et al., 2008; Bouoiyour et al., 2016; dan Vargas-Silva, 2016). Aktivitas migrasi meningkatkan pengiriman uang ke perdesaan baik dalam bentuk transfer maupun remitansi. Selanjutnya, tambahan uang yang diterima masyarakat perdesaan dibelanjakan untuk mendukung kegiatan ekonomi perdesaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan eksternalitas positif lainnya khususnya peningkatan pelayanan publik dan keuangan.

Kalkulasi migrasi yang dilakukan oleh penduduk di setiap daerah (provinsi) menghasilkan perbedaan satu sama lain. Ada daerah yang menerima migran masuk jauh lebih besar dari pada yang keluar (migrasi neto positif). Sebaliknya, ada pula menerima migran masuk lebih sedikit dari pada yang keluar (migrasi neto negatif).

Tabel 1.2
Penduduk Pindah Masuk/Keluar Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2022

No.	Pulau	Migran Masuk	Migran Keluar	Migran Neto
1.	Sumatera	958.344	901.811	56.533
2.	Jawa	2.491.675	1.754.516	737.159
3.	Kalimantan	319.284	325.600	-6.316
4.	Sulawesi	361.867	302.190	59.677
5.	Bali dan Nusa Tenggara	321.197	162.167	159.030
6.	Maluku dan Papua	116.598	146.083	-29.485

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan data di atas, penduduk yang masuk di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua lebih sedikit dari pada penduduk yang keluar (migrasi neto negatif). Sedangkan untuk Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, jumlah penduduk migran masuk lebih banyak dari pada penduduk yang keluar (migrasi neto positif). Perpindahan penduduk ke daerah tujuan biasanya didorong oleh alasan ekonomi berupa lapangan pekerjaan yang lebih luas dengan upah yang lebih tinggi. Aktivitas keluar dan masuknya penduduk dari dan ke suatu daerah secara nyata menimbulkan perubahan sosial ekonomi baik di daerah tujuan maupun daerah asal (Findley, 1977).

Bagi penduduk yang tinggal di sekitar wilayah industri atau peri urban, alih fungsi lahan yang terjadi di sektor pertanian mengancam terjadinya pengangguran apalagi jika pekerjaan utama mereka sebelumnya adalah bertani. Ancaman ini

semakin nyata apabila mereka tidak memiliki keahlian di luar bidang pertanian (Nguyen et al., 2016). Studi yang dilakukan oleh Dewi dan Rudiarto (2013) menyebut petani yang terdampak alih fungsi lahan mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki petani membuatnya tidak dapat mengakses pekerjaan formal. Akhirnya, angka pengangguran semakin meningkat dan diikuti pula oleh angka kemiskinan.

Studi yang dilakukan oleh Marjit dan Kar (2019) menghasilkan temuan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke industri secara masif terjadi di banyak negara berkembang. Secara lebih spesifik, alih fungsi lahan berdampak pada peningkatan upah bagi pekerja terampil tetapi tidak bagi pekerja tidak terampil. Pekerja terampil banyak menempati sektor industri dan jasa di mana upah ditentukan oleh pemerintah melalui upah minimum. Sementara sektor pertanian sebagian besar diisi oleh pekerja tidak terampil di mana masalah upah tidak ditentukan oleh pemerintah. Xiang et al. (2021) menambahkan bahwa alih fungsi lahan pertanian tidak memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk perdesaan. Kenyataannya justru membuat tingkat kemiskinan perdesaan semakin tinggi.

Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap wilayah perdesaan dengan mencanangkan program dana desa (Kementerian Keuangan, 2019). Terobosan penting itu memberikan sinyal bahwa desa perlu diberi kekuatan melalui ideologi manajemen "*money follow functions*" demi mencapai praktik pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa akan menerima dana desa yang berjumlah sekitar Rp1,2 miliar. Dana tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan untuk keperluan

honorarium. Namun, harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan untuk apa saja penggunaannya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana bentuk pelaporan keuangannya. Dengan memahami perkara tersebut, dana desa tidak dianggap sebagai sebuah keberuntungan bagi desa sebab di belakangnya terdapat amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Sejak ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan, transfer dari pusat ke daerah dalam bentuk dana desa terus meningkat. Laporan Kementerian Keuangan (2021) menyebutkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebanyak Rp20,76 triliun pada tahun pertama implementasi dana desa. Hingga 2022, total dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa sebesar Rp468,81 triliun rupiah. Salah satu porsi terbesar kebijakan dana desa digunakan dalam bidang pembangunan desa yang diarahkan melalui pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana desa, penyediaan layanan sosial dasar, dan peningkatan usaha ekonomi desa. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan kegiatan perekonomian di tingkat desa dan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan perdesaan.

Pemerintah menganggap bahwa dana desa mampu menghasilkan berbagai *output* baik dalam bentuk sarana maupun prasarana publik di tingkat desa. Dana desa juga dianggap mampu meningkatkan status desa menjadi lebih baik (Kementerian Keuangan, 2019). Sejalan dengan itu, penelitian tentang dana desa mulai banyak dilakukan. Sunu dan Utama (2019) menyebut dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian Wahyuddin et al. (2019). Namun, kesimpulan yang tidak sama disampaikan oleh Setianingsih (2016)

yang menganggap bahwa dana desa untuk pembangunan desa justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dana desa memang telah menghasilkan berbagai *output* di tingkat desa, namun masyarakat sebagai pengguna output tersebut belum mampu menghasilkan *outcome* secara agregat yang signifikan. Kondisi perdesaan di Indonesia dengan aneka ragam perbedaan budaya, infrastruktur, kemudahan akses, dan sebagainya membuat adanya variasi dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh bagaimana migrasi, alih fungsi lahan, dan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan. Apakah variabel-variabel tersebut mampu mengatasi kemiskinan perdesaan secara langsung atau akan jauh lebih efektif bila dimediasi melalui pertumbuhan sektor pertanian dan pengangguran. Dengan menggunakan konsep ini, masalah kemiskinan perdesaan diharapkan dapat ditelaah lebih rinci sehingga mampu melahirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan yang tepat sasaran. Hal ini juga dapat memperkaya khazanah ilmu ekonomi khususnya dalam masalah kemiskinan perdesaan.

1.2. Rumusan Masalah

Kemiskinan perdesaan merupakan masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini. Fakta menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan menyumbang porsi lebih besar terhadap tingkat kemiskinan nasional dari pada tingkat kemiskinan perkotaan. Berdasarkan teori perilaku (*behavioral theory*), kemiskinan dipengaruhi oleh adanya perbedaan pendapatan (*incentive*) dan budaya (*culture*). Pendapatan dapat diproksi dari pertumbuhan sektor pertanian. Sementara budaya dapat diamati dari produktivitas kerja dan/atau tingkat pengangguran. Terkait dengan hal tersebut

maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh langsung tingkat pengangguran terbuka perdesaan terhadap tingkat kemiskinan perdesaan.

Mengacu pada teori penyebab kemiskinan lainnya yakni teori struktural (*structural theories*), kemiskinan dapat dijelaskan dari dua kategori. Pertama, dari sisi ekonomi yang diproksi melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan, industrialisasi dan deindustrialisasi, aspek wilayah, dan keterampilan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar (*skills mismatches*). Kedua, dari sisi penduduk dan tenaga kerja yang dipandang dari kerusakan lingkungan atau alih fungsi lahan (*neighborhood disadvantage*), komposisi penduduk, urbanisasi, perpindahan penduduk (*residential segregation*) dan/atau peralihan penduduk (*demographic transition*). Perpaduan dari kedua teori di atas menghasilkan pandangan bahwa keadaan perekonomian secara struktural mampu mempengaruhi perilaku individu/masyarakat. Dengan demikian, fokus permasalahan ini adalah membahas sejauh mana pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui tingkat pengangguran perdesaan. Juga membahas sejauh mana migrasi neto dan alih fungsi lahan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan perdesaan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan.

Teori penyebab kemiskinan yang terakhir dapat dilihat dari sisi politik (*political theory*). Kemiskinan disebabkan karena adanya institusi yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah secara politik. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan transfer dalam bentuk dana desa. Sejatinya, salah satu tujuan

diterapkannya kebijakan ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan dengan menghasilkan berbagai output yang dapat memacu pertumbuhan sektor pertanian atau mengurangi pengangguran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dana desa berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka kajian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh migrasi neto penduduk baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan?
2. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan?
3. Bagaimana pengaruh dana desa baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan sektor pertanian baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui tingkat pengangguran terbuka perdesaan?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka perdesaan secara langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengukur dan menganalisis pengaruh migrasi neto baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan.
2. Mengukur dan menganalisis pengaruh alih fungsi lahan pertanian baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan.
3. Mengukur dan menganalisis pengaruh dana desa baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui pertumbuhan sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka perdesaan.
4. Mengukur dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor pertanian baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan melalui tingkat pengangguran terbuka perdesaan.
5. Mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka perdesaan secara langsung terhadap tingkat kemiskinan perdesaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan ekonomi studi pembangunan daerah (*regional economics*) dan melengkapi topik kajian kemiskinan perdesaan secara lebih spesifik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi, maupun pembanding bagi peneliti berikutnya yang mengkaji kemiskinan perdesaan melalui berbagai variabel yang telah dimodifikasi atau dikembangkan lebih jauh.

1.4.3. Kegunaan Kebijakan

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan perdesaan di Indonesia.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Kemiskinan di Indonesia sejatinya merupakan insidensi antara kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan. Agar masalah yang dibahas lebih terarah, penelitian ini mengkaji secara lebih spesifik kemiskinan perdesaan. Dengan demikian, data yang diambil berasal dari 33 provinsi di Indonesia, mengecualikan Provinsi DKI Jakarta. Pengecualian ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa tidak terdapat data perdesaan di provinsi tersebut meskipun terdapat penduduk yang berprofesi sebagai petani atau nelayan. Selain itu, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan di Indonesia Tahun 2020 menyatakan bahwa di Provinsi DKI Jakarta hanya terdapat desa perkotaan. Adapun rentang waktu yang diambil mulai dari 2015 hingga 2022 atau selama delapan tahun. Pada 2015, pemerintah mulai mengimplementasikan program dana desa yang salah satunya berfokus pada permasalahan kemiskinan perdesaan.

Berdasarkan teori penyebab kemiskinan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya, terdapat tiga teori utama yakni teori perilaku, teori struktural dan teori politik. Pada penelitian ini, peneliti mengambil satu variabel dari teori perilaku yaitu tingkat pengangguran terbuka perdesaan. Kemudian, tiga variabel dari teori struktural yakni pertumbuhan sektor pertanian, migrasi neto, dan alih fungsi lahan. Dan satu variabel yang mewakili teori politik yaitu dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Secara konseptual, kemiskinan sering dipandang dari berbagai sisi dan diklasifikasikan dalam berbagai aspek. Berdasarkan tingkat keparahan, kemiskinan dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan atas kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural (Agussalim, 2009).

Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum baik makanan maupun bukan makanan (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) yang diukur dari pendapatan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang akan dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut, begitu sebaliknya. Dewasa ini, kemiskinan absolut juga disebut kemiskinan ekstrem. Hanya saja, kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan tetapi juga ketersediaan jasa.

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat

dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok miskin, kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai pendapatan relatif lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan demikian, kelompok dengan pendapatan terendah diidentifikasi sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan alamiah terjadi karena kegagalan individu atau lingkungan sehingga menyebabkan seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau memperoleh pekerjaan. Alamiah dari sisi individu dapat berupa kemalasan, tidak dimilikinya keterampilan, kelemahan fisik, dan rendahnya kepekaan dalam menyikapi perubahan-perubahan di sekitarnya. Sedangkan dari sisi lingkungan, kemiskinan alamiah dapat terjadi karena alam dan/atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung, tidak adanya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya, dan perkembangan teknologi informasi yang rendah. Badrudin (2012) menyebut jenis kemiskinan ini sebagai kemiskinan kultural.

Kemiskinan struktural merujuk pada sistem sosial ekonomi yang berlaku yang memungkinkan terpusatnya kekuasaan dan sumber daya oleh pihak tertentu sehingga menghambat pihak lain untuk mengakses dan menggunakan sarana ekonomi dan fasilitas yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal ini juga didorong oleh rendahnya demokrasi, disintegrasi ekonomi nasional, kurangnya peran pemerintah sebagai perantara yang meminimalkan ketimpangan sosial, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, tercemarnya ekosistem, dan kebijakan yang menyebabkan monopoli ekonomi dan polarisasi masyarakat. Kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan pada masyarakat.

2.1.2. Teori Penyebab Kemiskinan

Teori penyebab kemiskinan sejatinya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. (Nurkse, 1971) menyebutnya dengan istilah *vicious circle of poverty*. Kemiskinan disebabkan adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal sehingga menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang mereka terima. Karena pendapatan yang dimiliki sedikit, maka tabungan dan investasi juga rendah. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, begitu seterusnya. Deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat.

Pemikir selanjutnya yang menyoroti masalah kemiskinan adalah Sen (1982). Ia sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa orang disebut miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, kebutuhan manusia juga semakin berkembang, tidak hanya berupa sandang, pangan, dan papan tetapi juga upaya meningkatkan kemampuan (*capability*) dan kesempatan yang sama bagi semua orang.

Menurut Sen, pendekatan kapabilitas lebih komprehensif dari pada pendekatan pendapatan untuk menilai seberapa jauh suatu tatanan mewujudkan pembangunan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan per kapita tetapi juga berkaitan erat dengan ketiadaan kemampuan manusia sebagai potensi sumber daya yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa tidak ada bencana kelaparan yang terjadi dalam sejarah dunia pada negara-

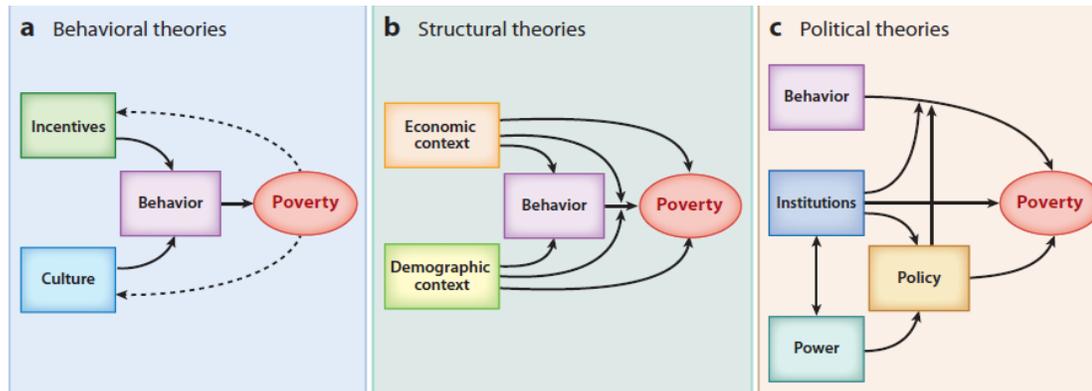
negara yang menerapkan sistem demokratis (*no famine has ever take place in the history of world in a function of democracy*). Dengan demikian, Sen menolak hipotesis Lee yang menduga bahwa untuk membangun perekonomian diperlukan sistem pemerintahan otoriter.

Menurut Rawls (2004) kemiskinan dapat disebabkan tidak adanya keadilan distribusi. Keadilan dipandang sebagai suatu keadaan di mana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara bersama-sama. Setiap orang memiliki hak yang sama. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat yang paling tidak diuntungkan akan memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama.

Teori keadilan distributif Rawls mendasari pemikirannya menggunakan posisi asal (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Prinsip asal berusaha memposisikan adanya situasi yang sama dan setara bagi setiap orang dalam masyarakat sehingga semuanya dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Adapun maksud dari selubung ketidaktahuan adalah bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri sehingga membutuhkan adanya konsep keadilan yang tengah berkembang.

Perkembangan terbaru mengenai teori ini disampaikan oleh Brady (2019) dalam jurnal *Annual Review of Sociology* Volume 45 No. 4. Dalam tulisannya yang berjudul *Theories of the Causes of Poverty*, ia mengemukakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh 3 komponen utama dari teori perilaku (*behavioral theories*), teori struktural (*structural theories*), dan teori politik (*political theories*) yang tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Kausalitas Teori Perilaku, Teori Struktural dan Teori Politik dalam Mempengaruhi Kemiskinan



Sumber : Brady (2019)

Perilaku individu yang tercermin dari pendapatan dan budaya dipengaruhi secara langsung oleh variabel dalam teori struktural dan teori politik. Konteks ekonomi dan demografi berpengaruh secara langsung terhadap perubahan perilaku individu. Sementara dalam teori politik, perubahan perilaku disebabkan oleh kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai jalan tengah antar kelompok pemangku kepentingan. Ketiga teori ini selanjutnya juga berpengaruh langsung terhadap kemiskinan.

Teori perilaku mendiskusikan seberapa besar perilaku dapat dikontrol oleh individu agar tidak terjerumus dalam kemiskinan. Menurut teori ini, perilaku adalah mekanisme kunci yang secara langsung menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi karena rasa malas, tidak adanya keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan, fisik yang lemah, sikap abai terhadap perubahan, perilaku yang kontraproduktif bahkan lebih memilih menganggur dari pada bekerja merupakan penyebab kemiskinan yang berasal dari dalam diri individu. Kategori miskin yang seperti ini akan sulit ditangani mengingat hal tersebut sudah menjadi karakter yang bersangkutan.

Ada kalanya kemiskinan juga datang dari luar individu yang mempengaruhi perilakunya seperti lingkungan atau alam yang tidak mendukung, tidak adanya sumber daya, dan perkembangan teknologi yang rendah. Tidak hanya itu, masalah rumah tangga seperti banyaknya anak juga turut mempengaruhi seseorang untuk menjadi miskin. Apalagi jika dalam rumah tangga tersebut hanya terdapat seorang ibu (*single motherhood*) yang menghidupi anak-anaknya.

Masalah lain sehubungan dengan perilaku yang menyebabkan kemiskinan adalah adanya disparitas ras atau kesenjangan rasial. Adanya perlakuan yang tidak sama terhadap ras minoritas dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin. Tidak jarang mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal hal tersebut adalah sesuatu yang alamiah dan hampir mustahil untuk diubah.

Perilaku individu yang dapat mempengaruhi kemiskinan dimotori oleh pendapatan dan budaya. Pendapatan yang diterima tercermin dari upah/gaji (*wages*) dan/atau tambahan penghasilan (*incentives*) lainnya. Dua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda akan tetapi sering kali disamakan karena sama-sama imbalan. Pendek kata, upah merupakan hak pokok pekerja sedangkan insentif merupakan imbalan lebih. Selanjutnya, bila dilihat dari sisi budaya, kegiatan masyarakat yang kontra produktif seperti pengangguran adalah hal yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh sistem ekonomi yang berlaku yang memungkinkan terpusatnya kekuasaan dan sumber daya oleh pihak tertentu. Sementara pihak lainnya tidak memiliki akses yang sama untuk ikut andil dan memanfaatkan sarana ekonomi yang tersedia. Menurut teori struktural, penyebab

kemiskinan dapat dipandang dari konteks ekonomi dan demografi. Pembangunan ekonomi untuk mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi acap kali dilakukan secara tidak demokratis. Kebanyakan masyarakat juga tidak diberikan akses untuk memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit dan akses pasar). Peran pemerintah dalam meminimalkan ketimpangan malah semakin terkikis.

Sementara itu, konteks demografi dalam teori struktural lebih menekankan pada perubahan lingkungan dan kependudukan. Industrialisasi yang kian masif dilakukan dapat mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat. Pembangunan yang timpang menyebabkan terjadinya spatial mismatch dan perpindahan penduduk. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga turut menambah panjang masalah kemiskinan. Komposisi penduduk yang diukur dari usia dan jenis kelamin juga termasuk bagian dari konteks demografi. Banyaknya penduduk pada usia produktif dapat menjadi motor penggerak perekonomian. Partisipasi tenaga kerja wanita juga turut mendorong penyelesaian masalah kemiskinan.

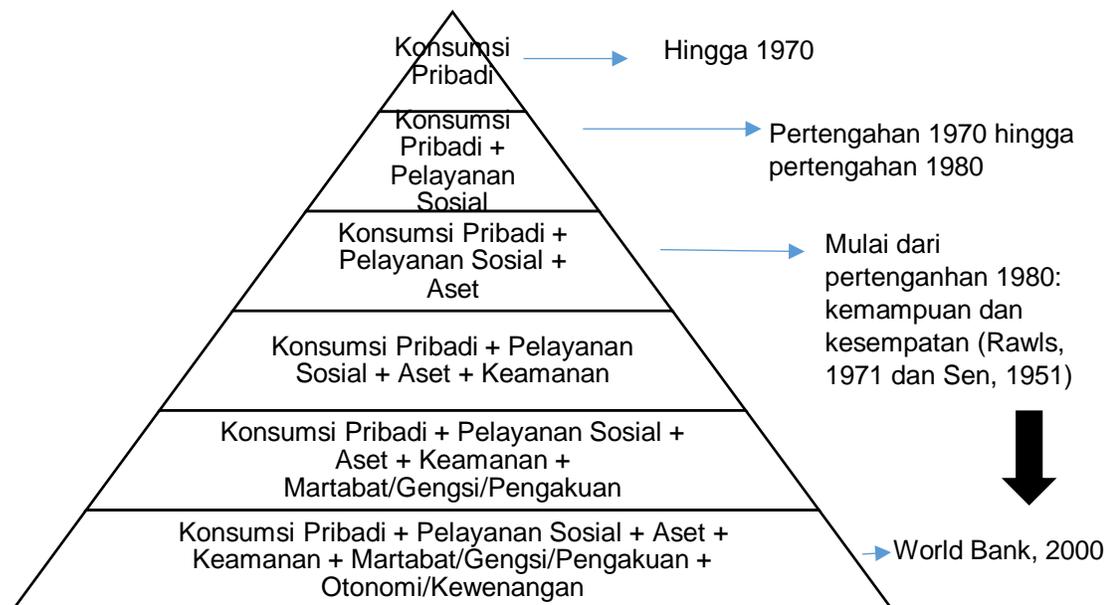
Selanjutnya, dilihat dari perspektif politik, kemiskinan disebabkan karena adanya institusi yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kekuatan tersebut berasal dari sektor politik yang memobilisasi kelas-kelas yang kurang beruntung seperti serikat pekerja, pilihan partai, dan tuntutan perluasan kesejahteraan negara. Mobilisasi ini menjadi penting karena secara bawaan dalam demokrasi kapitalis para politisi berpihak pada elit dan bisnis. Selain itu, tuntutan keadilan distribusi sumber daya ekonomi melalui peraturan perundang-undangan perlu ditetapkan.

2.1.3. Ukuran Kemiskinan

Berkaitan dengan pengukuran kemiskinan, sebuah survei yang dilakukan oleh *Department of Agriculture Survey of Consumption* dibawah *The Council of Economic Advisers* di Amerika pada tahun 1955 menarik untuk dikaji terlebih dahulu. Survei tersebut dilakukan terhadap rumah tangga dengan menetapkan kriteria miskin dari pemenuhan konsumsi atas kebutuhan dasar. Kriteria tersebut antara lain tidak adanya kelaparan, kecukupan gizi makanan terpenuhi, kesehatan, dan kondisi materi seperti penerangan, keadaan rumah, dan pakaian. Kriteria di atas kemudian diukur melalui tingkat pendapatan rumah tangga yang bersangkutan (Friedman, 1965).

Pada perkembangan selanjutnya, kriteria untuk menetapkan seseorang semakin bertambah sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.2 Perluasan Berkelanjutan (*Sustainable Expansion*) Konsep Kemiskinan Sejak 1970



Sumber : World Bank (2001)

Dari bagan perkembangan konsep kemiskinan di atas, Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (Indonesia) adalah lembaga yang mengadaptasi kriteria tersebut sejak 1980 dan 1994. Indikator kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya pada akhirnya melahirkan apa yang disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia dibedakan dalam dua kriteria. Pertama, garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional yang didasarkan pada paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) sebesar US\$1 dan US\$2. Adapun garis kemiskinan internasional digunakan Bank Dunia untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara.

Lebih lanjut, Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat dengan menggunakan PPP bukan nilai tukar (*exchange rate*). Hal ini disebabkan karena konversi kurs nilai mata uang suatu negara terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan komponen-komponennya dapat memberikan hasil yang tidak konsisten, antara lain berupa (1) konversi kurs gagal mencerminkan tingkat volume barang dan jasa yang sebenarnya yang diperbandingkan selama tahun tertentu, (2) konversi kurs gagal mencerminkan pergerakan volume relatif barang dan jasa sepanjang waktu (Kuncoro, 2015).

Konversi dengan menggunakan PPP dapat menghilangkan ketidak konsistenan kurs. PPP menghasilkan perbandingan berdasarkan kuantitas riil dari barang dan jasa. Karena US\$1 dan US\$2 yang terkonversi pada PPP dapat membeli jumlah barang dan jasa yang sama di setiap negara, maka hal ini memungkinkan Bank Dunia untuk mengestimasi jumlah orang di dunia yang hidup di bawah satu dolar atau dua dolar perhari (World Bank, 2001). Di Indonesia, nilai PPP US\$1 dan US\$2

mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang bisa dibeli dengan satu dolar Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara.

Pada perkembangan berikutnya, metode menghitung jumlah penduduk tergolong miskin berdasarkan pendapatan mulai banyak diragukan. Anand dan Sen (1997) mencatat bahwa konsep *Human Poverty Index* (HPI) mulai diadopsi dan dipromosikan oleh *United National Development Program* (UNPD) dalam sebuah *Human Development Reports* sejak 1997 hingga 2010.

Tabel 2.1 HPI untuk Negara Berkembang dan Negara OECD

No.	Dimensi	Negara berkembang	Negara OECD
1.	Panjang umur dan sehat	Mungkin saat lahir tidak bertahan sampai usia 40 tahun	Mungkin saat lahir tidak bertahan sampai usia 60 tahun
2.	Pengetahuan	Tingkat literasi penduduk	Persentase penduduk yang tidak memiliki keterampilan fungsional
3.	Standar hidup layak	(a) Persentase penduduk yang tidak menggunakan sumber air bersih; (b) Persentase anak dengan berat badan kurang menurut umur; dan (c) Perampasan standar hidup yang layak	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
4.	Pengasingan sosial	Tidak termasuk dalam dimensi	Tingkat pengangguran jangka panjang

Sumber: Prince, 2014.

HPI menggunakan indikator dimensi deprivasi yang paling mendasar dalam mengukur kemiskinan yakni lama hidup, kurangnya pendidikan dasar, dan kurangnya akses ke sumber daya publik ataupun swasta. HPI berkonsentrasi pada tiga elemen penting kehidupan manusia yakni kelangsungan hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*standard of living*) yang tercermin dalam *Human Development Index* (HDI). Meskipun demikian, terdapat perbedaan pengukuran HPI pada negara berkembang dan negara yang tergabung dalam *the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Tabel 2.2 Multidimensional Poverty Index (MPI)

No.	Dimensi	Indikator
1.	Kesehatan	1. Nutrisi
		2. Kematian anak
2.	Pendidikan	3. Lama sekolah
		4. Kehadiran sekolah
3.	Standar hidup layak	5. Bahan bakar memasak
		6. Sanitasi yang lebih baik
		7. Air minum yang aman
		8. Listrik
		9. Lantai rumah
		10. Aset-aset lainnya

Sumber: UNDP & OPHI, 2010.

Kajian mengenai pengukuran kemiskinan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Analisis *Human Development Report* 2010 yang diajukan oleh *United National Development Program* (UNPD) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan

baru melalui *Multidimensional Poverty Index* (MPI). Apabila sebelumnya kemiskinan diukur dari pendapatan atau konsumsi, MPI mendefinisikan kemiskinan lebih luas bukan sekedar pendapatan atau konsumsi tetapi juga keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang diuraikan dalam sepuluh indikator sebagaimana dalam Tabel 2.2.

Salah satu lembaga yang menghitung kemiskinan di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Definisi penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Rata-rata pengeluaran ini tercermin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan (*food line*) dan bukan makanan (*non-food line*). Kombinasi keduanya menghasilkan apa yang disebut garis kemiskinan atau *poverty line* (Kuncoro, 2015).

BPS menilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita perhari sebagaimana yang diungkapkan oleh Bank Dunia (World Bank). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak). Adapun kebutuhan bukan makanan terdiri atas perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Inilah yang kemudian menyebabkan BPS membagi kemiskinan ke dalam dua kategori berdasarkan wilayahnya yakni kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mendefinisikan

kemiskinan. Namun, penggunaan pendekatan kebutuhan dasar mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut (Kuncoro, 2015). Pertama, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur hanya dari sisi pengeluaran per kapita. Padahal kemiskinan sangat kompleks dan mempunyai banyak dimensi baik sosial maupun kultural. Kedua, metode ini kurang memperhatikan keterbandingan antar waktu dan antar wilayah. Ketiga, masih terdapat perdebatan tentang nilai standar minimum apakah harus didasarkan pada harga yang sebenarnya dibayarkan oleh penduduk miskin, atau harga yang sebenarnya dibayarkan oleh penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, atau harga yang tercatat dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).

Untuk mengkalkulasi kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemiskinan absolut (*Head Count Index*) dengan menghitung persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Rumusan ini mengikuti pendapat Foster et al. (2010) dalam formula berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^0$$

Di mana,

- P₀ : Persentase penduduk miskin (*Head Count Index*)
- z : Garis kemiskinan
- y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ...,q) y_i < z
- q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n : Jumlah penduduk

Di Indonesia, pendataan kemiskinan juga dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang secara khusus mencatat dan

melakukan pemantauan keluarga di Indonesia. Berbeda dengan BPS yang menggunakan data individu (per kapita), BKKBN menghimpun data dengan keluarga sebagai unit terkecilnya. Selain itu, terdapat perbedaan istilah yang digunakan kedua lembaga tersebut. BPS memakai istilah 'miskin' dan 'tidak miskin' dari hasil pengukurannya, sementara BKKBN menggunakan istilah 'keluarga prasejahtera' hingga 'keluarga sejahtera 3 plus'. Indikator yang dikeluarkan oleh BKKBN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penentuan Kesejahteraan Keluarga Menurut BKKBN

No.	Kategori	Indikator
1.	Keluarga Prasejahtera (Pra-KS)	1. Anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya
		2. Seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari
		3. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian
		4. Bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah
		5. Bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan
2.	Keluarga Sejahtera 1 (KS-1)	6. Anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur
		7. Keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu
		8. Setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun
		9. Tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni
		10. Ada anggota yang sakit dalam tiga bulan terakhir

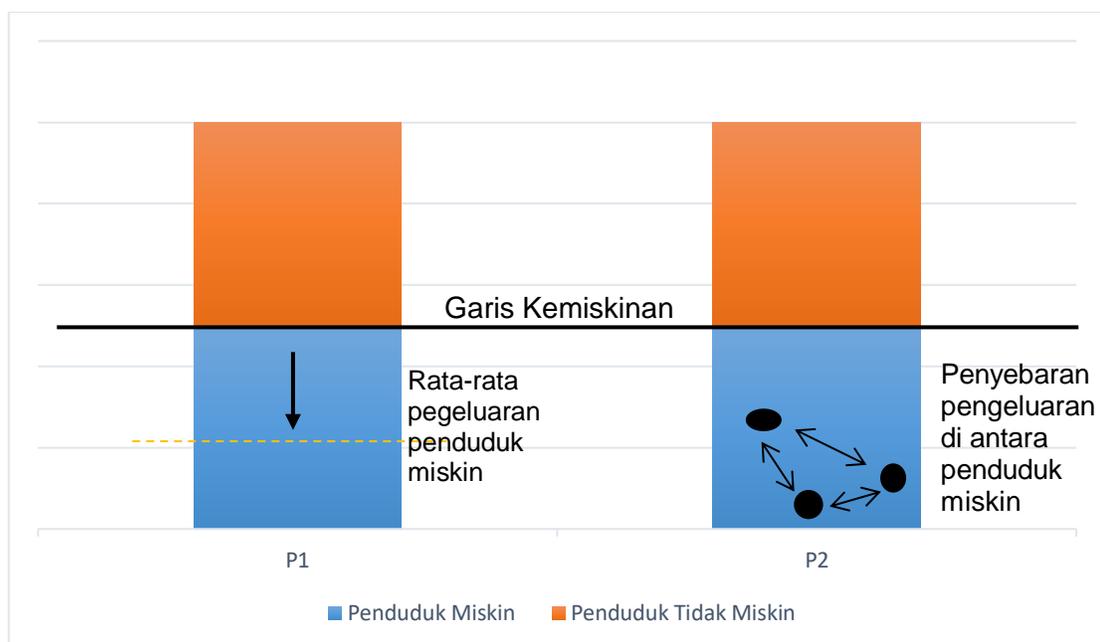
		11. Tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap
		12. Ada anggota keluarga berumur 10 – 60 tahun yang tidak bisa baca tulis
		13. Ada anak berumur 5 – 15 tahun yang tidak bersekolah
3.	Keluarga Sejahtera 2 (KS-2)	14. Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi
		15. Keluarga dapat meningkatkan pengetahuannya agamanya
		16. Sebagaimana penghasilan keluarga ditabung
		17. Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi
		18. Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat
		19. Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sebulan sekali
		20. Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah
4.	Keluarga Sejahtera 3 (KS-3)	21. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal
		22. Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial
5.	Keluarga Sejahtera 3 Plus (KS-3 Plus)	23. Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal

Sumber : Istidjoso et al. (2016)

Catatan : Sebuah keluarga dikategorikan sebagai Pra-KS bila belum bisa memenuhi indikator 1 hingga 5, KS-1 bila memenuhi indikator 1 hingga 5, KS-2 bila memenuhi indikator 1 hingga 14, KS-3 bila memenuhi indikator 1 hingga 21 dan KS-3 Plus bila memenuhi indikator 1 hingga 23.

Selain menggunakan metode di atas, ukuran kemiskinan juga dapat dihitung melalui indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2). Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauh dari garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Ilustrasi bagaimana kedua indeks ini bekerja dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.3 Ilustrasi Ukuran Kemiskinan P_1 dan P_2



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023.

2.1.4. Program Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Berbagai kebijakan dalam rangka mereduksi kemiskinan telah berulang kali dicoba. Secara umum terdapat tiga model kebijakan pengentasan kemiskinan yakni pendekatan langsung (*direct policies*), pendekatan tidak langsung (*indirect policies*), dan kebijakan terkait pemberdayaan (Kuncoro, 2015). Pada pendekatan langsung, pemerintah memberikan bantuan atau perlindungan sosial secara langsung kepada masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan beras untuk masyarakat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), bantuan bagi lanjut usia dan cacat, bantuan bencana alam, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan beasiswa untuk anak dari keluarga miskin. Pendekatan langsung ini seperti 'memberi ikan' langsung kepada kelompok sasaran.

Berbeda dengan pendekatan yang pertama, pendekatan tidak langsung memberikan peran serta pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Dalam pendekatan ini, pemerintah menggulirkan program-program dan anggaran berbasis masyarakat yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang seolah mengajari masyarakat bagaimana caranya untuk 'memancing ikan'.

Pendekatan yang terakhir adalah usaha pemerintah memberdayakan masyarakat supaya 'mempunyai pancing dan perahu sendiri'. Hal ini dilakukan dengan cara memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM),

perbaikan iklim usaha, dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kredit di bawah lima juta rupiah (Nursini, 2020). Dengan demikian, masyarakat akan berusaha dan menentukan nasibnya sendiri dalam mengatasi kemiskinan.

Jika dicermati, pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan masih tampak parsial, sektoral, dan belum menyentuh pada akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Meski upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan nyatanya kemiskinan masih sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, politik, sosial, bahkan bencana alam. Program yang telah diupayakan juga tidak terlepas dari berbagai catatan kritis. Pada pendekatan langsung masih banyak program yang tidak tepat sasaran baik dari sisi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pendistribusian. Banyak ditemukan pendataan peserta yang masih lemah. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga belum optimal.

Pada pendekatan tidak langsung, ditemukan kekurangan pada saat realisasi program. Program pemberdayaan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan. Bantuan yang diberikan belum dapat menciptakan kesempatan kerja atau menumbuhkan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Perhatian pemerintah setempat terhadap pemeliharaan infrastruktur dan aset juga masih rendah. Hal yang sama juga terjadi pada pendekatan yang ketiga. Ini didorong oleh lemahnya layanan keuangan bukan bank, rendahnya minat UMKM untuk memanfaatkan program, hingga keterbatasan jangkauan cakupan KUR. Catatan ini menjadi penting untuk dipertimbangkan kembali agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.1.5. Model Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Menurut Solow (1956) pertumbuhan ekonomi merupakan interaksi antara persediaan modal (*capital*, K), angkatan kerja (*labour*, L), dan teknologi (T) dalam perekonomian. Peran penting kemajuan teknologi sangat dominan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selibuhnya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Dengan demikian, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu dapat digunakan kombinasi teknologi, modal, dan tenaga kerja yang berbeda-beda.

Model pertumbuhan ekonomi jangka panjang Solow dibangun berdasarkan asumsi-asumsi berikut. Pertama, komoditi yang diproduksi merupakan satu komoditi gabungan. Kedua, faktor produksi yang berupa buruh dan modal, dibayarkan sesuai dengan produktivitasnya. Ketiga, harga dan upah dianggap fleksibel. Keempat, buruh terpekerjakan secara penuh. Kelima, persediaan modal juga digunakan secara penuh. Keenam, buruh dan modal dapat disubstitusikan satu sama lain. Ketujuh, kemajuan teknologi bersifat netral. Dengan asumsi tersebut, Solow menganggap bahwa rasio modal-buruh akan cenderung menyesuaikan diri dan menuju ke arah keseimbangan. Jika perbandingan antara modal terhadap buruh lebih besar, maka modal dan output akan tumbuh lebih lambat dari pada tenaga buruh, begitu sebaliknya.

Menurut teori ini, variabel teknologi diasumsikan bersifat eksogen, artinya teknologi tidak dipengaruhi oleh variabel lain atau menjadi variabel independen (bebas). Dalam suatu fungsi produksi, teknologi dianggap tetap. Oleh karena itu, hukum *the law of diminishing return* akan berlaku apabila penambahan *input* produksi terus dilakukan dan terjadi penurunan dari *output* yang dihasilkan.

Berkaitan dengan pertumbuhan sektor pertanian, migrasi penduduk memungkinkan terjadinya pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian di mana angkatan kerja yang ada akan berpindah ke sektor lain. Jika pada masa sebelumnya terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, maka migrasi dapat berpengaruh positif bagi pertumbuhan sektor pertanian sebab tenaga kerja yang digunakan mencapai titik optimal (*full employment*). Namun, jika migrasi terjadi secara masif dan besar-besaran maka sektor pertanian akan mengalami kekurangan tenaga kerja. Akhirnya, pertumbuhan sektor pertanian menjadi turun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perubahan yang terjadi pada kondisi ketenagakerjaan dapat berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka perdesaan. Meningkatnya migrasi penduduk dapat berpengaruh pada menurunnya tingkat pengangguran terbuka perdesaan dengan syarat hal tersebut cenderung menuju titik *full employment*. Jika yang terjadi sebaliknya, maka tingkat pengangguran terbuka perdesaan dapat meningkat sebab banyaknya tenaga kerja di perdesaan yang tidak memperoleh pekerjaan.

Dalam pertumbuhan sektor pertanian, variabel modal dapat berupa tanah yang jumlahnya tetap. Tanah dapat berkurang apabila terjadi alih fungsi lahan dari yang sebelumnya digunakan untuk pertanian kemudian berubah menjadi pabrik, perumahan, atau yang lainnya. Meningkatnya alih fungsi lahan dapat berpengaruh pada menurunnya pertumbuhan sektor pertanian. Adapun teknologi dapat diproksi dari variabel dana desa di mana salah satu tujuan program tersebut adalah untuk menciptakan infrastruktur pertanian di perdesaan. Dana tersebut seharusnya dapat berpengaruh positif bagi pertumbuhan sektor pertanian.

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam beberapa literatur pertumbuhan ekonomi baru (*new growth theory*). Teori ini menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Infrastruktur dianggap sebagai *input* faktor produksi yang akan mempengaruhi *output* agregat baik secara langsung maupun melalui eksternalitas produksi lainnya seperti aksesibilitas, kelancaran distribusi, kemudahan kegiatan produksi, dan efisiensi waktu.

2.1.6. Teori Ketenagakerjaan

Terdapat dua teori yang perlu dikemukakan berkaitan dengan masalah tenaga kerja di pedesaan. Pertama, teori Lewis (1954) yang mengemukakan kelebihan tenaga kerja merupakan kesempatan dan bukan suatu *problem*. Kedua, teori Fei-Ranis (1961) mengenai tiga tahapan pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh (tenaga kerja).

Teori Lewis (1954) dikenal dengan penawaran buruh yang tidak terbatas. Ia berasumsi bahwa perekonomian suatu negara terbagi menjadi dua sektor yakni sektor subsisten dan sektor kapitalis. Perekonomian sektor subsisten bersifat tradisional dan didominasi oleh sektor pertanian umumnya di wilayah pedesaan, memiliki kelebihan tenaga kerja, dan upah rendah. Perekonomian sektor kapitalis bersifat modern dan didominasi oleh sektor industri yang terdapat di wilayah perkotaan. Sektor ini mempekerjakan buruh dengan upah yang lebih tinggi dibandingkan sektor subsisten. Hal ini disebabkan karena *output* yang diproduksi di sektor ini digunakan sebagai instrumen untuk menghasilkan laba. Kondisi ini membuat produktivitas tenaga kerja sangat tinggi dan produk marginal bernilai positif.

Sektor subsisten tradisional memiliki kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah relatif lebih murah dibandingkan sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal perdesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama proses industrialisasi terus berjalan, kelebihan tenaga kerja subsisten tradisional di perdesaan akan terus terserap. Bersamaan dengan itu, pada suatu periode tertentu upah di perdesaan akan meningkat dan mengurangi perbedaan upah di kedua wilayah (perdesaan dan perkotaan).

Dengan demikian, menurut Lewis (1954) adanya kelebihan penawaran tenaga kerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kelebihan tersebut merupakan sebuah kapital untuk mengakumulasi pendapatan dengan catatan bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke kapitalis modern berjalan lancar dan tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, tampaknya ia tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai urbanisasi dan polanya. Teori ini pada gilirannya mendapatkan kritik dari pemikir selanjutnya. Kenyataan menunjukkan bahwa mobilitas buruh tidaklah mudah, produktivitas buruh di sektor pertanian juga tidak bernilai nihil akan tetapi produktivitas menurun bersamaan dengan migrasi buruh (Jhingan, 2018).

Gustav Ranis dan John Fei (1961) dalam karangannya yang berjudul *A Theory of Economic Development* menelaah lebih jauh proses perpindahan penduduk khususnya tenaga kerja antar daerah dalam pembangunan ekonomi. Teori yang dikemukakan keduanya merupakan penyempurna dari teori sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Lewis (1954) dianggap gagal memberikan penjelasan tentang

pertumbuhan di sektor subsisten (pertanian). Teori Ranis-Fei berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki ciri-ciri kelebihan buruh, sumber daya alam belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat fertilitas tinggi.

Menurut Ranis & Fei (1961), pembangunan ekonomi yang kelebihan tenaga kerja dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama menggambarkan keadaan pekerja yang menganggur tersamar dan tidak menambah *output* pertanian dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional. Upah institusional adalah upah nyata di sektor industri yang dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) di sektor pertanian. Pada tahap kedua, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi hasilnya lebih kecil dari pada upah institusional yang mereka peroleh. Para pekerja semacam ini juga dialihkan ke sektor industri. Jika migrasi para pekerja berlangsung terus menerus, akan dicapai suatu titik di mana pekerja pertanian menghasilkan *output* yang sama dengan upah institusional. Tahap ketiga menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada. Hal ini tercermin dari *output* pertanian yang lebih besar dari pada perolehan upah institusional. Pada tahap ini kelebihan buruh sudah terserap optimal.

Model mereka dipandang cukup sederhana dan mampu menjelaskan pengalaman pertumbuhan ekonomi di negara maju. Namun, perekonomian di negara berkembang belum semapan perekonomian di negara maju. Jika melihat proses pembangunan di negara berkembang, model tersebut setidaknya menyimpang dari beberapa asumsi berikut (Jhingan, 2018):

Pertama, tingkat perpindahan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor perkotaan adalah proporsional terhadap tingkat akumulasi modal. Semakin cepat tingkat akumulasi modal, pertumbuhan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja semakin tinggi. Namun asumsi ini terlanggar bila perusahaan justru memilih menghemat tenaga kerja (*labor – saving investment*).

Kedua, asumsi bahwa di sektor pertanian terjadi kelebihan tenaga kerja dan di sektor industri terjadi penggunaan tenaga kerja penuh (*full – emplouyement*) tidak selalu benar. Kenyataan menunjukkan di perkotaan mengalami pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Kelebihan tenaga kerja di perdesaan hanya terjadi pada musim tanam dan musim panen.

Ketiga, upah dianggap konstan (tetap) hingga seluruh tenaga kerja di perdesaan terserap. Padahal, upah di perkotaan terus mengalami kenaikan baik secara absolut ataupun relatif meskipun pada saat yang sama terjadi pengangguran. Upah di perdesaan juga cenderung naik seiring dengan meningkatnya produktivitas pertanian.

Tiga tahun setelah Lewis mengungkapkan teorinya dan menyarankan masyarakat perdesaan untuk migrasi ke perkotaan, Myrdal (1957) sudah terlebih dahulu hadir mengkritik teori tersebut. Secara komprehensif, Myrdal mengungkapkan dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perpindahan tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang demikian itu menghasilkan suatu proses sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, sementara mereka yang bekerja sebagai buruh kian terhambat. Tidak hanya berlaku bagi si kaya, keadaan ini juga berlaku bagi daerah yang

bersangkutan. Tenaga kerja muda yang aktif dan produktif datang ke wilayah yang kegiatan ekonominya telah berkembang cenderung akan menguntungkan wilayah tersebut. Akan tetapi, menekan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh yang bersangkutan. Pada gilirannya, ketimpangan antar individu dan wilayah (*region*) semakin lebar. Inilah yang disebut dampak balik oleh Myrdal.

Dampak pembangunan ekonomi melalui aktivitas urbanisasi tidak berhenti sampai di situ. Dampak sebar yang diungkapkan Myrdal menyatakan bahwa ada dampak pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari sentra ekspansi ekonomi ke wilayah lainnya. Biasanya seluruh wilayah di sekitar sentra-sentra perkembangan akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya kegiatan ekonomi. Dampak ini akan terus menjalar ke daerah-daerah yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra tersebut sehingga permintaan semakin meningkat.

Lebih lanjut, Myrdal menyatakan bahwa tenaga kerja yang berpindah ke perkotaan, dalam jangka panjang, akan menimbulkan kelangkaan tenaga kerja di perdesaan. Orang akan lebih memilih bekerja di sektor industri dari pada pertanian. Dengan demikian, sektor pertanian akan terhambat dan produktivitasnya semakin turun. Jika pengaruh ini meluas hingga ke sektor industri yang membutuhkan hasil pertanian maka *Gross National Product* (GNP) juga diperkirakan akan turun.

Kondisi di atas menarik banyak penduduk perdesaan melakukan migrasi. Kebutuhan tenaga kerja di perkotaan semakin tercukupi dan penggunaan tenaga kerja di perdesaan dapat dioptimalkan untuk menghasilkan nilai produktivitas tinggi. Keadaan ini pada gilirannya mendorong terjadinya perubahan struktur perekonomian

dari yang sebelumnya mengandalkan sektor pertanian kemudian beralih menjadi sektor industri dan jasa (Syrquin & Chenery, 1989). Bagi negara yang menerapkan perekonomian tertutup, transformasi ekonomi akan melahirkan inefisiensi pada hasil industri. Namun, keadaan sebaliknya berlaku bagi negara yang menerapkan perekonomian terbuka.

Dalam pandangan yang relatif baru, migrasi dimotori oleh penduduk yang memiliki keterampilan tinggi bahkan bergelar akademis atau profesional dari lembaga pelatihan dan perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Docquier et al., (2007) yang menyebut penduduk migran berketerampilan tinggi dengan istilah *brain drain (or high skill) migration*. Menurutnya, faktor pendorong utama penduduk melakukan migrasi adalah dimilikinya keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Faktor geografis seperti jarak tidak menjadi pertimbangan yang terlalu signifikan. Keadaan ini pada akhirnya menghasilkan seleksi positif di antara para migran. Mereka yang tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi pendidikan tertentu akan tersingkir dari persaingan di pasar tenaga kerja (Docquier & Rapoport, 2012).

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah pengangguran, para ekonom memiliki definisi yang berbeda-beda mengacu pada faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut. *Classical Theory of Unemployment* merupakan teori pengangguran yang dicetuskan oleh ekonom klasik. Mereka berpendapat adanya intervensi dari pemerintah melalui regulasi yang ditetapkan dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Menaikkan upah minimum misalnya, akan meningkatkan biaya tenaga kerja lebih dari nilai ekonomi tenaga kerja sebenarnya. Akibatnya, pengusaha mempekerjakan lebih sedikit pekerja demi mengurangi biaya.

Marx et al. (1954) mengkritik teori pengangguran yang dicetuskan oleh ekonom klasik (kapitalis). Menurutnya, sistem ekonomi kapitalis memang memerlukan adanya pengangguran. Kaum proletariat atau kelas penerima upah dalam sistem kapitalis ada untuk menyediakan pasokan tenaga kerja cadangan yang diperlukan untuk menciptakan tekanan ke bawah pada upah. Sesama tenaga kerja akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang langka sambil mendorong upah semakin rendah.

Perbedaan argumen disampaikan oleh para ekonom dari aliran Keynesian. Keynes (1937) dan penganut aliran pemikiran Keynesian telah menjelaskan bahwa pengangguran terjadi ketika permintaan agregat tidak cukup dalam perekonomian. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengurangi pengangguran dengan mendorong permintaan agregat.

Joseph Stiglitz (1983) memperkenalkan *Implicit Contract Theory* untuk menjelaskan masalah pengangguran yang terjadi pada masa resesi. Teori ini menganggap bahwa kontrak kerja dan lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan mempersulit pengusaha untuk memotong upah buruh. Oleh karena itu, ketika para pengusaha bermaksud menghemat biaya dan mengoptimalkan operasinya, mereka akan memilih untuk memberhentikan pekerjanya (mengurangi tenaga kerja) daripada menerapkan pengurangan upah.

Dari penjelasan mengenai konsep ketenagakerjaan di atas, dalam upaya mengumpulkan data, Badan Pusat Statistik (2022) merujuk pada *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk

bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 sampai 64 tahun. Penduduk kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun tergolong penduduk bukan usia kerja.

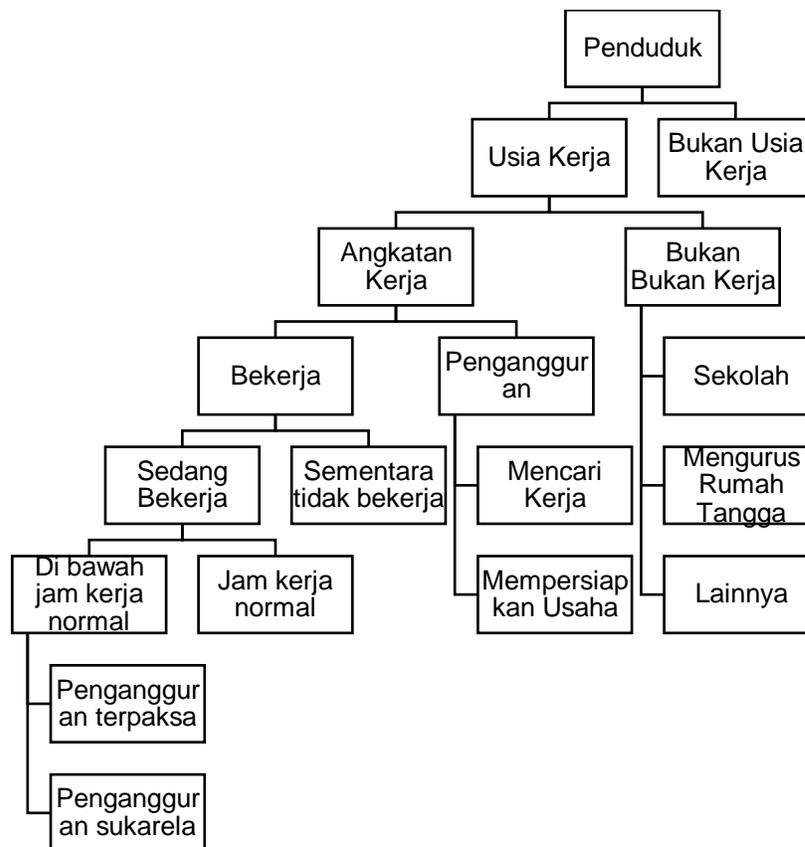
Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya. BPS juga seringkali mengistilahkan penganggur terbuka, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Istilah ini juga lekat dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Dalam khazanah lainnya, orang yang menganggur dapat dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh (mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur (pengangguran terpaksa) ialah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain disebut juga

dengan pengangguran sukarela. Secara ringkas, konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS dapat dilihat dari bagan berikut:

Gambar 2.4 Diagram Ketenagakerjaan



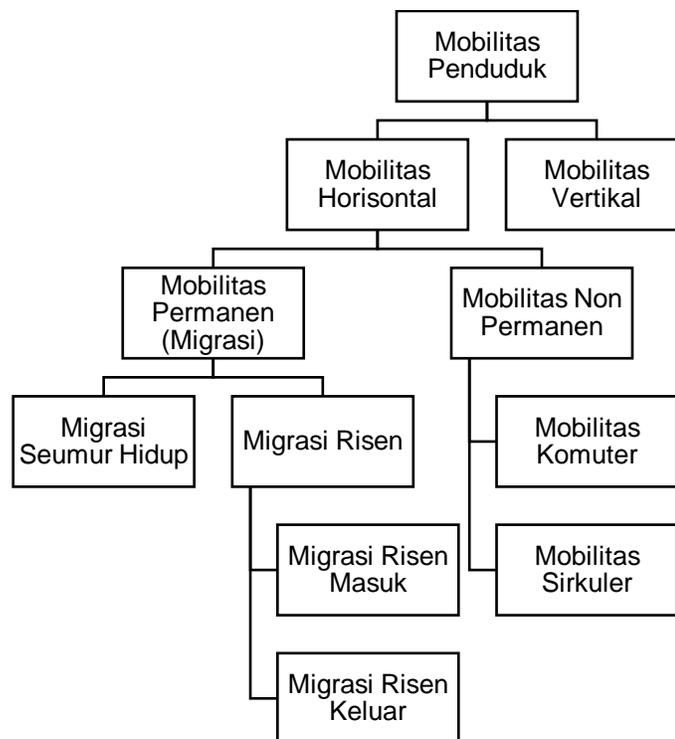
Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja BPS, 2023.

Berkaitan dengan migrasi neto yang dibahas dalam penelitian ini, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep mobilitas penduduk. Sebagaimana dinyatakan oleh Mantra (2000) mobilitas penduduk mencakup pergerakan geografis (antar provinsi) dan sosial (perubahan status sosial) sehingga terdapat dua jenis mobilitas yakni

horisontal dan vertikal. Mobilitas horisontal terdiri atas mobilitas permanen dan non permanen. Ketentuan pembagian mobilitas horisontal didasarkan pada niat menetap atau tidak menetap di daerah tujuan dari pelaku mobilitas.

Mobilitas permanen kemudian disebut sebagai migrasi yang terdiri dari migrasi seumur hidup dan migrasi risen. Dikatakan migrasi seumur hidup jika tempat tinggalnya saat ini berbeda dengan tempat lahirnya. Sedangkan migrasi risen adalah migrasi menurut tempat tinggal lima tahun yang lalu. Migrasi risen dibagi menjadi migrasi risen masuk dan migrasi risen keluar. Selisih dari migrasi risen masuk dan migrasi risen keluar disebut migrasi neto.

Gambar 2.5 Jenis Mobilitas Penduduk



Sumber: Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja BPS, 2023.

Migrasi non permanen terdiri dari mobilitas komuter dan mobilitas sirkuler. Disebut mobilitas komuter jika pergerakan penduduk secara rutin pergi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam dengan melewati batas administratif kabupaten/kota. Mobilitas sirkuler adalah pergerakan penduduk secara rutin pergi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tinggal dalam jangka mingguan atau bulanan dengan melewati batas administratif kabupaten/kota.

2.1.7. Teori Penggunaan Lahan

Konsep tanah mencakup berbagai fungsi yang biasanya diklasifikasikan ke dalam kategori lingkungan, ekonomi, masyarakat, dan spiritualitas (budaya). Dari segi lingkungan tanah dipandang sebagai tanah, sebagai penyerap polusi, sebagai filter air minum, dan sebagai habitat satwa liar. Ini menyediakan hubungan antara sistem hidrologi, atmosfer, dan iklim. Dari segi ekonomi, tanah dapat dipandang sebagai ruang yang langka untuk lokasi kegiatan produksi ekonomi, infrastruktur dan tempat tinggal, sebagai tanah produktif yang menyediakan bahan organik dan anorganik untuk pertanian, sebagai penyimpan aset dan sumber daya, dan sebagai sumber nilai estetika dan layanan kemudahan. Pada tingkat sosial, kepemilikan tanah bertindak sebagai sumber prestise dan prinsip pengorganisasian hubungan sosial-ekonomi. Untuk beberapa budaya, tanah adalah dewa yang mengendalikan rakyatnya (Hubacek & van den Bergh, 2006).

Konsep tanah dalam ilmu ekonomi menunjukkan persepsi yang semakin terbatas hanya terkait kontribusi alam bagi kesejahteraan manusia. Pada awal abad ke-20 minat kajian terhadap tanah dibatasi hanya pada atribut yang memberikan nilai

ekonomi langsung. Namun, seiring dengan terjadinya berbagai krisis lingkungan dan meningkatnya kesadaran lingkungan pada akhir abad ke-20, berbagai aspek lahan, seperti dukungan keanekaragaman hayati atau sumber daya tak terbarukan, telah kembali ke wacana ekonomi (Randall & Castle, 1985).

Dalam pandangan pra-klasik (Merkantilisme dan Fisiokrat), tanah merupakan sumber kekayaan sebab memberi bahan makanan bagi kelangsungan hidup manusia jika dikelola dengan baik. Tanah yang produktif akan semakin mahal harganya dan produktivitas yang dihasilkan dari tanah akan menentukan kekayaan bagi negara. Pada perkembangan selanjutnya di mana industri mulai lahir, ekonom klasik berpendapat bahwa pertanian lebih produktif dari pada industri sebab pertanian mengkombinasikan dua sumber daya utama yakni tanah dan tenaga kerja untuk mencapai produktivitas maksimum. Sedangkan industri hanya menggunakan satu sumber daya yakni tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui pembagian kerja (Aspromourgos, 1995).

Industrialisasi di berbagai belahan dunia mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan sektor pertanian semakin terpinggirkan. Tanah sebagai salah satu faktor produksi oleh ekonom neoklasik dianggap tidak memiliki sifat yang unik sehingga harus dikesampingkan dengan sendirinya dalam analisis ekonomi (Cropper & Griffiths, 1994). Lahan hanya memiliki arti penting sehubungan dengan tata guna lahan dan alokasinya dari waktu ke waktu. Premis dasar yang mendasari pemikiran ini adalah bahwa semua agen ekonomi menunjukkan perilaku memaksimalkan utilitas dan keuntungan yang tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh teknologi, sumber daya, dan kebijakan pemerintah (O'Callaghan, 1996).

Tanah adalah salah satu faktor produksi yang penting keberadaannya, baik untuk aktivitas pertanian, industri maupun jasa. Dalam perspektif ekonomi, pasokan tanah adalah tetap sebab tanah merupakan sumber daya alam (*natural resources*) yang tidak dapat ditambah (Cobb & Douglas, 1928). Dalam fungsi produksi, tanah merupakan salah satu faktor *input* yang akan dikombinasikan dengan faktor *input* lainnya untuk menghasilkan *output* tertentu. Dalam bidang usaha pertanian, tanah menjadi faktor produksi yang penting keberadaannya sebab media untuk menghasilkan produk pertanian berasal dari tanah. Sementara dalam bidang usaha lainnya, tanah merupakan modal tetap (aset) yang digunakan sebagai lokasi untuk kegiatan operasional usaha.

Setiap bidang tanah memiliki lokasi tetap dengan biofisik yang unik dan atribut aksesibilitas yang mengatur peluang dan kendala bagi aktivitas manusia. Penggunaan lahan di lokasi tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesuburan tanah untuk pertanian tetapi juga eksternal seperti lokasi yang strategis dan kemudahan akses ke pasar (Verburg et al., 2006).

Terkait dengan adanya peralihan atau konversi penggunaan lahan pertanian untuk aktivitas industri dan jasa dapat dijelaskan melalui teori tawar sewa tanah Alonso (*Bid-Rent Theory*) dan model penggunaan lahan pertanian oleh McFadden. Alonso (1964) menyebut bahwa dalam pasar tanah yang kompetitif, pengguna tanah berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka, tanah dibeli atau disewa oleh penawar yang menawarkan harga tertinggi. Oleh karena itu, penggunaan tanah diharapkan dapat memberikan manfaat terbesar dengan mempertimbangkan manfaat relatif dari pemakain lahan alternatif.

Sementara itu, Mcfadden (1977) berkontribusi untuk menjelaskan dan memprediksi hasil dari pengambilan keputusan pelaku ekonomi ketika memilih alternatif pilihan. Pola penggunaan lahan pertanian dipengaruhi oleh faktor spasial, sosial budaya, politik, teknologi dan ekonomi. Faktor spasial terkait dengan konfigurasi biofisik lingkungan dan koneksi transportasi. Sosial budaya mengarah pada demografi, sejarah, tradisi, profil petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Sementara faktor politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengubah arus perdagangan, skema kebijakan yang mempengaruhi pendapatan petani, sampai dengan rezim yang mengatur akses ke tanah. Adapun teknologi berkaitan dengan metode untuk menambah kapasitas produksi. Sedangkan faktor ekonomi berupa harga faktor produksi, akses pembiayaan, permintaan komoditas pertanian, dan neraca/struktur perdagangan. Keputusan untuk menjual atau menyewa lahan pertanian sejatinya kembali pada pemilik lahan. Pengambilan keputusan itu merujuk pada faktor yang mempengaruhinya. Secara utilitas, keputusan tersebut adalah keputusan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia.

Perhatian publik terhadap masalah tanah dewasa ini telah memicu kebijakan yang berbeda-beda. Paling tidak terdapat dua terminologi dalam mengatasi masalah lahan yakni alih fungsi lahan (*land conversion*) dan reformasi lahan (*land reform*). Alih fungsi lahan merujuk pada perubahan penggunaan lahan dari kegiatan pertanian ke non pertanian. Sedangkan reformasi lahan dimaksudkan sebagai kebijakan yang mendukung petani melalui penyitaan tanah milik tuan tanah dan pengurangan sewa untuk petani sehingga petani yang tidak memiliki tanah dapat memperoleh tanah untuk digarap mereka sendiri (Deng & Huang, 2004; X. Q. Zhang, 1997).

Dalam perkembangannya, reformasi lahan merupakan sebuah kampanye kolektivisasi. Petani individu dipaksa untuk bergabung secara kolektif dan membentuk sebuah lembaga. Namun, reformasi lahan ini tidak bertahan lama sebab buruknya kinerja lembaga tersebut. Pada akhirnya, reformasi lahan yang dipelopori oleh reformasi perdesaan memperkenalkan sistem kontrak berbasis keluarga di mana lahan milik sebuah keluarga dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab keluarga (Chen & Davis, 1998).

2.1.8. Instrumen Kebijakan Publik (Fiskal)

Salamon (1989) mendefinisikan instrumen kebijakan publik sebagai alat utama untuk mengubah atau menyebabkan timbulnya perilaku warga negara melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Perubahan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kehati-hatian, pencegahan, kegiatan mempromosikan, dan pengaktifan perilaku tertentu. Schneider dan Ingram (1990) menilai bahwa tujuan kebijakan sering kali memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan perilaku yang diinginkan.

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlepas dari keuangan publik yang melandasinya. Musgrave & Peacock (1958) menyebut bahwa keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana yang ada untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Dalam sebuah laporan keuangan publik seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan publik terdiri dari tiga komponen yaitu penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

Korelasi antara keuangan pusat dan daerah dalam bentuk transfer fiskal ditemukan di beberapa negara. Pengalihan tersebut merupakan konsekuensi dari opsi pemerintahan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Menurut Shah (2006) dan Fisher (2018) transfer fiskal umumnya terdiri dari dua jenis yakni hibah bersyarat dan hibah tanpa syarat.

Jenis yang pertama dipilih untuk memecahkan masalah tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah pusat, meskipun pemerintah daerah memiliki pendapat yang berbeda. Jenis yang kedua tidak memberikan syarat apapun sehingga transfer dana dapat dibelanjakan cara apapun tanpa batasan. Pembenaan utama dari pemerintah pusat untuk memberikan hibah tanpa syarat kepada provinsi (daerah) adalah hibah yang dapat digunakan untuk pemerataan perbedaan kapasitas fiskal pemerintah daerah, yang kemudian berfungsi untuk memastikan penyediaan layanan standar atau pelayanan publik.

Penelusuran akan kebijakan dana desa dapat merujuk pada teori kebijakan fiskal. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa kebijakan fiskal merupakan intervensi pemerintah dalam penggunaan pajak, transfer dan belanja untuk barang dan jasa guna menggeser kurva permintaan agregat. Kebijakan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada 2015 merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan. Dasar hukum kebijakan tersebut adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini menekankan pentingnya desentralisasi desa, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyedia layanan pada tingkat administrasi terendah dan menangani masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan (Lewis, 2015).

Dana desa termasuk dalam belanja pemerintah (*government expenditure*) yang ditujukan untuk daerah (*expenditure for region*). Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pengalokasian dana desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Kebijakan dana desa juga dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa (*rural development*). Meskipun gagasan ini juga masih diperdebatkan dalam tataran praktik maupun teori. Terdapat dua pertanyaan kunci dalam masalah ini (Van der Ploeg et al., 2000). Pertama, apakah pembangunan perdesaan dalam tataran praktik hanyalah serangkaian insiden kecil sebagai pengalaman yang ditakdirkan untuk tetap berada pada dalam kondisi tertentu yang diilhami secara politis atau sebagai hasil dari transformasi pertanian? Kedua, apakah pembangunan perdesaan merupakan alternatif serius yang mampu menahan kemerosotan pertanian dan modernisasi perekonomian perdesaan?

Kebijakan dana desa merupakan sebuah terobosan dari pemerintah dalam paradigma pembangunan dari bawah. Kebijakan desentralisasi yang paling dekat dengan rakyat. Desa diberi kekuatan untuk mengelola baik pemerintahan melalui ideologi manajemen "*money follow functions*". Outcome yang diharapkan dari kebijakan ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan jaringan komunikasi, penguatan ekonomi, dan revitalisasi sosial dan budaya. Untuk memahami kegunaan dana desa maka aparat desa harus memahami disiplin anggaran negara. Setiap pengeluaran didasarkan atas perencanaan yang jelas dan pertanggungjawaban keuangan tidak boleh salah.

2.2. Tinjauan Empiris

Kajian penelitian sebelumnya diperlukan untuk mengetahui bagian apa yang telah diteliti dan bagian apa yang belum diungkap. Berikut ini dikemukakan beberapa hasil studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini (kemiskinan perdesaan) dengan beberapa variabel penentu sebagai berikut:

2.2.1. Migrasi Neto dan Kemiskinan Perdesaan

Migrasi dapat berpengaruh pada kemiskinan melalui saluran yang berbeda. Ravallion et al., (2007) mengungkapkan kantong kemiskinan pada mulanya berada di perdesaan. Namun, migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan membuat kemiskinan di perkotaan meningkat. Penduduk yang bermigrasi lebih cepat dari pada penanganan kemiskinannya. Hasil studi ini dibantah oleh Adams dan Page (2005) bahwa migrasi dapat mengurangi kemiskinan baik dari segi tingkat kemiskinannya, kedalamannya maupun keparahannya melalui transfer atau remitansi. Artinya, migrasi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui variabel intervening.

Secara lebih spesifik, Acosta et al., (2008) meneliti pengaruh migrasi bagi wilayah perdesaan. Migrasi meningkatkan pengiriman uang ke desa. Selanjutnya, uang tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan produksi di perdesaan. Tambahan modal yang diterima meningkatkan produktivitas kerja dan menurunkan kemiskinan. Menurut Bouoiyour et al., (2016) pengiriman uang yang dilakukan oleh para migran tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan produksi tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penguasaan teknologi informasi, layanan kesehatan, dan penguasaan skill.

Hasil penelitian di atas terkonfirmasi dari penelitian sebelumnya. Kesimpulan sederhana yang dapat diambil adalah migrasi mampu mengurangi kemiskinan perdesaan jika melalui saluran eksternalitas positif yang ditimbulkan, baik dalam bentuk remitansi sebagaimana disampaikan Grigorian dan Melkonyan (2011), pengurangan tingkat pengangguran terbuka (Kim, 2007), maupun penguatan nilai mata uang (Yang, 2008).

Dalam pandangan yang relatif baru, pengaruh migrasi terhadap penurunan kemiskinan diarahkan melalui saluran peningkatan pasar tenaga kerja, penyesuaian harga dan biaya hidup, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan layanan keuangan (Vargas-Silva et al., 2016). Meningkatnya migrasi cenderung mengurangi sedikit upah bagi pekerjaan bergaji rendah. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya penduduk yang bermigrasi tidak memiliki kompetensi untuk bekerja pada pekerjaan bergaji tinggi. Banyaknya pekerja di sektor informal justru membuat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Oleh karena itu, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari migrasi terhadap pengangguran.

Aktivitas migrasi tampaknya mendorong penurunan biaya barang dan jasa. Migrasi menghasilkan harga yang lebih terjangkau bagi penduduk setempat. Hal ini ditengarai sebagai akibat terpusatnya kegiatan masyarakat yang berada di perkotaan. Kebanyakan barang yang dibutuhkan konsumen dapat dengan mudah didapatkan. Selain itu, bebas keluar masuk pasar menciptakan persaingan harga di antara sesama produsen. Biaya barang dan jasa pada akhirnya membuat biaya hidup berubah.

Pekerja migran juga berkontribusi pada peningkatan pelayanan masyarakat khususnya jasa kesehatan dan sosial, dan pelayanan keuangan. Aktivitas migrasi meningkatkan kebutuhan layanan keuangan dari perbankan khususnya untuk kegiatan pengiriman uang baik dalam bentuk transfer ataupun remitansi. Sementara itu, layanan pendidikan di daerah asal juga meningkat sebab orang tua memiliki penghasilan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi (tidak hanya pendidikan dasar).

2.2.2. Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan

Tanah (lahan) adalah salah satu faktor produksi yang penting keberadaannya baik untuk aktivitas pertanian, industri maupun jasa. Dalam perspektif ekonomi, pasokan tanah adalah tetap. Penggunaan lahan di lokasi tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesuburan tanah untuk pertanian tetapi juga eksternal seperti lokasi yang strategis dan kemudahan akses ke pasar (Verburg et al., 2006).

Sejumlah *papers* yang membahas kaitan lahan dan kemiskinan mulai banyak dilakukan. Ekspansi sektor industri dan jasa saat ini telah menjadi dominan dan menggeser peran sektor pertanian dalam perekonomian. Sarkar (2007) menyebut bahwa perubahan lahan pertanian menjadi pusat industri dan jasa sudah secara masif dilakukan pemerintah. Apalagi jika aliran dana investasi telah masuk (Marjit & Kar, 2019a). Tanah masyarakat khususnya petani, dibeli (ganti rugi) dengan harga yang murah. Namun jika proyek telah berjalan dan tanah beserta bangunan di atasnya dijual kembali, harganya bisa lebih dari dua kali lipat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas perekonomian semakin beragam. Aktivitas tersebut memicu kebutuhan lahan yang semakin luas, baik untuk tempat tinggal ataupun tempat usaha. Belum lagi ditambah dengan perkembangan kota yang semakin maju menuntut daerah di sekitarnya untuk ikut menyangga kebutuhan tersebut. Alih fungsi tersebut menyebabkan banyak lahan pertanian berubah menjadi perumahan dan/atau industri.

Dewi dan Rudiarto (2013) mengidentifikasi alih fungsi lahan pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah pinggiran di Kota Semarang. Alih fungsi lahan pertanian terjadi secara progresif pada area-area pengembangan seperti area dekat pusat kota dan kawasan pendidikan. Petani yang kehilangan lahan sawahnya mayoritas mengalami penurunan pendapatan. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan yang dimiliki petani menjadikannya sulit untuk mengakses pekerjaan formal. Belum lagi, masuknya penduduk baru (pendatang) yang juga ikut dalam pasar. Keadaan ini berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran.

Hasil penelitian sebelumnya didukung oleh penelitian Dewi dan Sarjana (2015). Mereka menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian didorong oleh rendahnya pendapatan usaha tani dan adanya usaha di luar sektor non pertanian yang semakin berkembang. Akibat dari pengalihan ini adalah pendapatan masyarakat petani yang semakin berkurang dan pengangguran meningkat akibat hilangnya pekerjaan. Hasil penelitian di luar negeri juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. alih fungsi lahan pertanian ke industri secara masif terjadi di banyak negara berkembang.

Xiang et al., (2021) menyebut transisi penggunaan lahan telah menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati, struktur industri, kepadatan penduduk, dan aspek lainnya. Masalah ini semakin mendapat perhatian para peneliti sebab masyarakat khususnya yang bekerja sebagai petani semakin miskin. Pengentasan kemiskinan perdesaan dan revitalisasi daerah perdesaan melalui konsolidasi tanah mendesak untuk segera dilakukan (Xiang et al., 2021; Yun-li et al., 2021).

2.2.3. Dana Desa dan Kemiskinan Perdesaan

Studi mengenai dampak pengeluaran pemerintah secara umum terhadap kemiskinan perdesaan telah berlangsung sejak lama. Fan et al., (2002) pernah mengkaji peranan pengeluaran pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan perdesaan di Cina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah di sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan, serta pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan secara nyata berpengaruh pada penurunan kemiskinan perdesaan.

Dalam penelitian lain, Fan dan Zhang (2008) mengkonfirmasi pengaruh baik pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan perdesaan khususnya di Uganda. Hasil yang mereka peroleh antara lain bahwa kemiskinan perdesaan dapat diatasi melalui investasi pemerintah dalam bentuk infrastruktur perdesaan, pelayanan pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan, pengeluaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan produk pertanian berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan perdesaan melalui peningkatan produktivitas pertanian.

Kedua hasil penelitian di atas dibantah oleh Diao et al., (2010). Dia menyebut bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan pertanian di Asia dapat berpengaruh pada penurunan kemiskinan perdesaan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi negara-negara di Afrika. Tantangan pengembangan sektor pertanian di sana dinilai lebih kompleks. Selain menghadapi perubahan iklim yang ekstrem, pembangunan sektor pertanian di Afrika juga dihadapkan pada masalah infrastruktur, akses keuangan, akses pupuk, dan akses pasar. Ficawoyi & Kevin, (2016) dalam penelitiannya memberi saran agar perbankan dan/atau lembaga keuangan mikro menyentuh wilayah perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di perdesaan memperoleh akses keuangan untuk menciptakan pembangunan pertanian.

Respon pemerintah atas berbagai masalah perekonomian perdesaan di Indonesia dibuktikan dengan lahirnya kebijakan dana desa. Kebijakan yang mulai diimplementasikan pada 2015 hingga sekarang ini telah menuai berbagai output. Studi yang dilakukan oleh Sunu dan Utama (2019) menyebut dana desa berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil yang sama dikemukakan oleh Wahyuddin et al., (2019) bahwa dana desa dapat menurunkan angka kemiskinan. Dengan menggunakan data 433 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, (Sigit & Kosasih, 2020) menemukan bahwa dana desa berpengaruh negatif sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin secara agregat. Sedangkan Setianingsih (2016) menyatakan bahwa dana desa digunakan oleh pemerintah desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Program ini dinilai lebih mampu meningkatkan derajat kesejahteraan dari pada program pemerintah desa lainnya seperti pembangunan desa dan pembinaan masyarakat.

Melalui skema yang hampir sama dengan dana desa, ditemukan bahwa pemerintah Laos menerapkan kebijakan *Village Development Fund* yang diwujudkan dalam bentuk pinjaman mikro untuk masyarakat desa (Paavola, 2012). Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas usaha yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pinjaman ini, penduduk juga semakin banyak yang bekerja. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana penduduk dapat bekerja dan memiliki penghasilan yang berkelanjutan. Studi empiris lainnya mengungkap bahwa dana yang diberikan langsung kepada desa berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan perdesaan (Robertson et al., 2015).

2.2.4. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan

Sejumlah *paper* yang menguji keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan telah banyak dilakukan. Setidaknya terdapat tiga perspektif berbeda. Pertama, pertumbuhan ekonomi tidak cukup menurunkan kemiskinan. Kedua, pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan melalui saluran penurunan ketimpangan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi mereduksi kemiskinan secara langsung. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh variasi studi, baik dari sisi subjek penelitian maupun teknik pengumpulan dan analisis data.

Anggapan pertama dimotori oleh hasil penelitian Ahluwalia et al. (1979) yang fokus pada kemiskinan di negara berkembang. Beberapa studi terbaru yang mendukung anggapan ini antara lain Afridi et al. (2021) dan Cheema dan Sial (2012). Mereka berpendapat pertumbuhan ekonomi tidak *pro-poor*. Masyarakat miskin hanya mendapatkan manfaat yang lebih sedikit dari pertumbuhan ekonomi.

Pandangan kedua terkenal dengan istilah *Poverty-Growth-Inequality* (PGI) Triangle. Kajian awal yang membahas keterkaitan tiga variabel ini adalah Ravallion (1995) kemudian didukung oleh Bourguignon (2004); Kakwani et al. (2003), Thorbecke (2013), dan Zaman dan Khilji (2013). Mereka sepakat kemiskinan dapat diturunkan apabila pertumbuhan ekonomi mampu menekan laju ketimpangan.

Argumen ketiga menyebut pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap turunnya kemiskinan. Pendapat ini dinyatakan oleh Bigsten dan Levin (2000), dan Dollar dan Kraay (2002). Dollar et al. (2016) memperkuat anggapannya dengan menyajikan hasil penelitian terbaru dari data 121 negara selama empat dekade terakhir. Namun, studi terbaru yang dilakukan oleh Vandemoortele and Delamonica (2022) membantah anggapan ini di mana pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti lebih memfokuskan pada keterkaitan pertumbuhan ekonomi pertanian dan kemiskinan perdesaan. Foster dan Rosenzweig (2004) pernah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian adalah kunci menurunkan kemiskinan perdesaan. Mengingat pertanian merupakan kegiatan utama masyarakat di perdesaan, maka meningkatnya produktivitas memicu perolehan upah yang lebih banyak sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

Studi yang relatif baru dilakukan oleh Suryahadi et al., (2009) dan Zaman dan Khilji (2013) mendukung pernyataan tersebut. Mereka menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi sektoral dan pengurangan kemiskinan menurut perkotaan dan perdesaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat

mengurangi kemiskinan di semua sektor dan lokasi. Bahkan pertumbuhan ekonomi pertanian berperan utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan perdesaan. Dalam penelitian lainnya, Didu dan Fauzi (2016) mengamati pertumbuhan ekonomi regional yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh pada penurunan kemiskinan.

2.2.5. Pengangguran dan Kemiskinan Perdesaan

Dalam berbagai literatur disebutkan ketika terjadi gelombang pengangguran maka akan diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan. Berkaitan dengan kemiskinan perdesaan, Weber et al., (2005) menjelaskan bahwa pengangguran di perdesaan lebih dominan berpengaruh pada kemiskinan di wilayah tersebut. Sebab, jenis pekerjaan di perdesaan tidak lebih bervariasi dibandingkan jenis pekerjaan di perkotaan. Selain itu, tenaga kerja di perdesaan juga dihadapkan pada masalah etnis. Perempuan di sana umumnya lebih sulit untuk memasuki dunia kerja dari pada laki-laki baik itu disebabkan karena pendidikannya yang rendah, tidak dibukanya kesempatan kerja bagi perempuan, atau budaya yang mengharuskannya tinggal di rumah.

Selain tidak adanya kesempatan kerja, pengangguran di perdesaan meningkat juga disebabkan karena perekonomian yang tidak berpihak. Pemerintah tidak memberi perhatian lebih pada sektor pertanian secara khusus atau sektor informal pada umumnya. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa sektor pertanian mampu untuk mendorong perekonomian lebih ekspansif sebagaimana yang terjadi pada tahun 1970-an di Cina (Ravallion, 2016).

Studi sebelumnya yang disampaikan oleh Chaudhuri dan Banerjee (2010) menyebut bahwa seharusnya pemerintah menaruh investasi di sektor pertanian untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di pedesaan. Bukan terobsesi untuk menjadi negara maju dengan cara mempercepat pembangunan industrinya yang berujung pada hilangnya pekerjaan di sektor pertanian. Tulisan mereka membantah anggapan sebelumnya bahwa melalui pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspansi industri dan jasa akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru pada sektor non pertanian di pedesaan (Lanjouw et.al., 2001).

Dukungan terhadap upaya membangun sektor pertanian ditawarkan oleh Ayinde (2008). Jika dengan bantuan teknologi, industri mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak, maka sektor pertanian juga diharapkan demikian. Penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produksi pertanian dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan pedesaan berkurang. Murwirapachena et al., (2013) menyarankan agar pemerintah dapat berperan aktif dalam upaya menanggulangi pengangguran dan kemiskinan pedesaan melalui fiskalnya.